



# Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 47 Volume 12 September 2016

**Indonesia Tuan Rumah The 4th BIMP-EAGA Power and Energy Infrastructure Cluster (PEIC)**

**Sinergi untuk Keandalan Kelistrikan di Kalimantan Timur**

## Presiden Jokowi Resmikan PLTG Gorontalo 100 MW

**Resensi Buku: Penjelasan PUIL 2011**



**Perkuat Kekeluargaan, Ditjen Ketenagalistrikan Gelar Halal bi Halal**

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

# Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

mendukung Zona Integritas

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

serta

Wilayah Bebas dari Korupsi



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan  
Jakarta Selatan 12950  
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044  
[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)



## Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 47 Volume XII |  
SEPTEMBER 2016

### SUSUNAN REDAKSI Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Ketenagalistrikan

#### Redaktur

Totoh Abdul Fatah  
Wiwid Mulyadi  
Heru Setiawan  
Ear Marison  
Hagni Surendro  
Sudarti  
Jackson Frans  
Fathorrahman  
Hari Dwi Wijayanto  
Pandu Satria Jati B  
Anggita Miftah Hairani  
David F Silalahi  
Ahmad Amiruddin  
Miftah Haris  
Novan Akhriyanto  
Dina Andriani  
Hening Surya Bayu A.  
Fanny Ristantono  
M. Tomas Triananta

#### Penyunting/ Editor

Hutami Hikma Asih  
Ernawaty  
Sahri Mahmud  
Ridwan Budi Santoso

#### Desain Grafis/Fotografer

Achmad Yusuf Haryono  
Agus Supriyadi  
Ajat Munajat  
Agah Muhammad Abduh  
Adar

#### Sekretariat

Emi Tursilah  
Irman Suryana  
Novi Pravitasari  
Lutfhi  
Dewi Agustini

#### Alamat Redaksi

Redaksi Buletin Ketenagalistrikan  
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,  
Kav.7-8, Kuningan  
Jakarta Selatan 12950

[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)

# Dari Redaksi

Pembaca yang budiman,

Kerjasama antarnegara menjadi hal yang tak terelakkan di era globalisasi, tak terkecuali di subsektor ketenagalistrikan. Untuk itu, dalam buletin edisi September 2016 ini kami ulas berbagai kerjasama yang dilakukan Ditjen Ketenagalistrikan; khususnya dalam lingkup ASEAN. Selain itu, kami juga mengulas progres pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan seperti peresmian PLTG Gorontalo 100 MW serta groundbreaking PLTU Lontar Unit 4 dan MPP Jeranjang oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam rubrik Kolom, kami hadirkan analisis mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) serta tinjauan langsung ke PLTN Hamaoka di Jepang. Melalui artikel ini, diharapkan Pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang sejarah serta pasang-surut perkembangan PLTN di Jepang.

Berbagai berita lain juga kami bahas; mulai dari pengesahan RUPTL hingga perayaan kemerdekaan HUT ke-71 Indonesia.

Selamat membaca!

*Salam Redaksi*

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Syarat Teknis :

1. Font penulisan naskah menggunakan Arial
2. Ukuran font yang digunakan 12
3. Jarak spasi penulisan 1,5
4. Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata

#### Syarat Umum:

1. Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
2. Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3. Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
4. Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6. Naskah dikirim melalui email ke [humas.djk@gmail.com](mailto:humas.djk@gmail.com)
7. Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan *caption*
8. Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9. Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

# DAFTAR ISI

[Sumber foto: <http://www.aseanenergy.org>]



6

**Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri *The 30<sup>th</sup> SOME and It's Associated Meetings* di Myanmar**

## Dari Redaksi

### Tajuk Utama

- 6 Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri *The 30<sup>th</sup> SOME and It's Associated Meetings* di Myanmar
- 8 Kerjasama Ketenagalistrikan dan Energi dengan Myanmar Terus Ditingkatkan
- 9 Indonesia dan Korea Selatan Tingkatkan Kerjasama Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dan Migas
- 10 Ditjen Ketenagalistrikan Selenggarakan *Workshop on Renewable Energy dan Energy Efficiency and Conservation*
- 12 Indonesia Tuan Rumah *The 4<sup>th</sup> BIMP-EAGA Power and Energy Infrastructure Cluster (PEIC)*
- 13 Ditjen Ketenagalistrikan Bagi Pengalaman Reformasi Tarif Tenaga Listrik ke ERAV Vietnam

### Warta Kita

- 14 Rasio Elektrifikasi Banten Capai 94,78%
- 15 Pemerintah Targetkan 7000 MW dari Panas Bumi pada 2025
- 18 Sukseskan 35.000 MW, Pemerintah Keluarkan Regulasi dan Deregulasi
- 20 Dirjen Ketenagalistrikan Temui Asosiasi Dinas Pengelola ESDM Provinsi se-Indonesia
- 21 Menteri ESDM Lantik 37 Pejabat Ditjen Ketenagalistrikan
- 22 PPNS Ketenagalistrikan Gelar Workshop Tindak Pidana di Manado
- 23 Dirjen Ketenagalistrikan Tinjau Pusat Pengatur Beban Sistem Minahasa
- 24 Presiden Jokowi Resmikan PLTG Gorontalo 100 MW

- 25 Presiden Jokowi Resmikan *Groundbreaking* PLTU Lontar Unit 4
- 26 Kunjungi Bali, Presiden Jokowi Tinjau PLTDG Pesanggaran 200 MW
- 27 *Groundbreaking* MPP Jeranjang, Jokowi Tegaskan Pantau Pembangunan Ketenagalistrikan
- 28 Menteri ESDM dan Komisi VII DPR RI Gelar Raker Asumsi Dasar APBNP 2016
- 29 Bahas Subsidi Listrik, Pemerintah dan Banggar DPR Selenggarakan Rapat Koordinasi Ditjen Ketenagalistrikan Selenggarakan Upacara HUT ke-71 Indonesia
- 36 Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Paparkan Kronologis Pengesahan Draft RUPTL
- 40 Konsumen dan Penyedia Listrik Harus Tahu Hak dan Kewajibannya
- 44 RUPTL Harus Menjawab Kebutuhan dan Rencana Pembangunan
- 48 Koordinasi Pusat dan Daerah di Bidang Ketenagalistrikan Terus Ditingkatkan
- 50 Sinergi untuk Keandalan Kelistrikan di Kalimantan Timur
- 52 Ditjen Ketenagalistrikan Gelar Buka Puasa Bersama
- 53 Perkuat Kekeluargaan, Ditjen Ketenagalistrikan Gelar Halal bi Halal
- 57 Pemberian Hadiah Lomba Foto HUT ke-71 Kemerdekaan Indonesia

### Galeri

- 30 Semangat HUT ke-71 Kemerdekaan RI

### Resensi

- 34 Penjelasan PUIL 2011

### Tips

- 38 Tips Senam Ringan di Meja Kerja

### Kolom

- 54 *Quo Vadis* PLTN Jepang: Isu Keselamatan PLTN dan Keandalan Listrik Jepang di Masa Depan

### Pojok Peraturan

- 58 Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK Januari - September 2016



**Wapres: Jika Ingin Setara dengan Negara Lain, Program 35.000 MW Harus Didukung**



**MKI Luncurkan Rangkaian Acara HLN ke-71**



**Kembali Gelar *Coffee Morning*, Ditjen Gatrik Sosialisasikan RUPTL Terbaru**



**Ditjen Gatrik Sosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan di Mataram**

# Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri *The 34<sup>th</sup> SOME and It's Associated Meetings* di Myanmar



Para delegasi berfoto bersama dalam 34th SOME yang berlangsung di Myanmar, 12-15 Juli 2016. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (ketiga dari kiri).

Dalam rangka kerjasama energi *Association of South East Asian Nation* (ASEAN), Dirjen Ketenagalistrikan Jarman selaku *Senior Official on Energy (SOE) leader* Indonesia menghadiri pertemuan *The 34<sup>th</sup> Senior Official Meeting on Energy (SOME) and It's Associated Meetings* yang berlangsung 12-15 Juli 2016 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Jarman memimpin delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Setjen Dewan Energi Nasional (DEN), Ditjen Migas, Kementerian Luar Negeri, dan PT. Pertamina.

SOME merupakan pertemuan tahunan antara para pejabat tinggi energi se-ASEAN untuk membahas berbagai kemajuan dan isu kerjasama energi di kawasan regional ASEAN, dimana hasil pertemuan ini selanjutnya akan dibahas pada

pertemuan *The 34<sup>th</sup> ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) and Its Associated Meetings* yang direncanakan akan berlangsung pada September 2016 di Myanmar. Pertemuan dibuka oleh Loo Took Gee dari Malaysia yang dalam sambutannya menyampaikan sejumlah kemajuan kerjasama energi dalam masa keketuaan Malaysia di bidang kerjasama energi ASEAN. Ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pemanfaatan energi secara strategis di kawasan ASEAN. Seluruh peserta pertemuan kemudian menunjuk Htein Lwin dari Myanmar selaku Chairman.

Perwakilan Sekretariat ASEAN menyampaikan *update* dan *highlight* atas keputusan yang disepakati dari pertemuan setingkat menteri dan setingkat pejabat tinggi yang telah

## Tajuk Utama



Dalam SOME dibahas berbagai kemajuan dan isu kerjasama energi di ASEAN.  
[Sumber foto: <http://www.myanmarinternationaltv.com>]

berlangsung sebelumnya, termasuk pertemuan *The 33<sup>th</sup> AMEM* dan *The ASEAN Economic Community (AEC) Council* khususnya yang terkait mekanisme pelaksanaan dan penerapan *AEC Blueprint 2025*. Pada tahun 2015, AEC telah terbentuk sebagai komitmen bersama, sehingga seluruh kegiatan utama dan pendukung kerjasama energi di kawasan ASEAN harus mendukung terwujudnya komunitas ekonomi ASEAN tersebut.

Beberapa pertemuan terkait SOME juga dilaksanakan beriringan dengan pertemuan inti. Sejumlah inisiatif kerjasama telah diusulkan; di antaranya Pemerintah Amerika Serikat melalui inisiatif *U.S.-ASEAN Energy Connect* mengusulkan kegiatan *USAID Clean Power Asia Initiative* dapat dilaksanakan antara tahun 2016-2020. Inisiatif *U.S.-ASEAN Connect* ("Connect") merupakan kerangka kerja yang menyatukan kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat dan ASEAN sebagaimana diumumkan oleh Presiden Obama pada Pertemuan *U.S.-ASEAN Leaders' Summit* di Sunnylands, CA. Inisiatif tersebut terdiri atas empat pilar: *Business Connect*, *Energy Connect*, *Innovation Connect*, dan *Policy Connect*. Program ini mengkombinasikan keahlian dan sumber daya pemerintah Amerika Serikat dan sektor swastanya untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi Amerika Serikat dan ASEAN, serta membantu ASEAN untuk mencapai integrasi ekonomi dalam AEC.

Di bidang energi, pilar *ASEAN Connect Energy* akan fokus mengatasi tantangan di kawasan ASEAN dengan mempertautkan inovasi Amerika Serikat dan kewirausahaan

di bidang tenaga listrik untuk lebih mengintegrasikan tujuan berbagi energi dengan tujuan strategis ekonomi yang lebih luas. *Energy Connect* akan memprioritaskan pengembangan sektor energi yang berkelanjutan, efisien dan memanfaatkan inovasi teknologi. Hal tersebut akan mendukung konektivitas, pemanfaatan energi bersih, dan menjamin ketahanan energi sebagaimana telah tertuang dalam *the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016-2025 fase I (2016-2020)*.

Potensi kegiatan dalam kerangka kerjasama *Connect*, yaitu (i) pengembangan dan adopsi peta jalan energi terbarukan di negara terpilih, (ii) pengembangan rencana pemanfaatan sumber daya untuk energi terbarukan yang terhubung ke jaringan tenaga listrik, dan (iii) promosi investasi asing di bidang energi terbarukan. Sementara itu, kerjasama energi antara ASEAN dengan Pemerintah Rusia fokus pada bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, energi nuklir, dan promosi energi terbarukan. (RBS)

# Kerjasama Ketenagalistrikan dan Energi dengan Myanmar

## Terus Ditingkatkan



Kerjasama Indonesia dengan Myanmar di sektor ketenagalistrikan dan energi yang telah berjalan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Sejak tahun 2012, telah terjalin kerjasama antara Kementerian Ketenagalistrikan dan Energi Myanmar dengan PT PLN (Persero) terkait pengurangan susut jaringan di Myanmar. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman berharap agar kerjasama tersebut dapat ditingkatkan dan dikembangkan tidak hanya di sektor ketenagalistrikan namun juga di sektor lain. Hal tersebut disampaikan Jarman, saat melakukan *Courtesy Call* kepada Menteri Ketenagalistrikan dan Energi Myanmar, U Zay Yar Aung pada hari Rabu (13/7).

*Courtesy call* tersebut dilakukan di sela rangkaian pertemuan *The 34<sup>th</sup> Senior Official Meeting on Energy (SOME) and Its Associated Meetings* yang berlangsung Selasa (12/7) hingga Jumat (15/7), di Nay Pyi Taw, Myanmar. Dalam kesempatan tersebut Jarman didampingi oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Satry Nugraha, perwakilan Ditjen Migas, Ditjen Ketenagalistrikan dan KBRI Yangon. Sementara Zay didampingi oleh sejumlah pejabat dim lingkungan kementerian Ketenagalistrikan dan Energi Republik Persatuan Myanmar.

Zay menghargai dan mengucapkan terima kasih atas peran PLN membantu Myanmar dalam mengurangi susut jaringan tenaga listrik. Selain itu, ia juga mengakui bahwa saat ini Pertamina sedang dalam tahap penjajakan untuk dapat berinvestasi sektor hilir minyak bumi di Myanmar. Pihaknya akan tetap mengundang Pertamina berpartisipasi dalam beberapa proyek di Myanmar. Zay juga mengharapkan

peningkatan kerjasama energi antara pihak BUMN dan swasta Indonesia dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas di Myanmar secara khusus di bidang *hydropower*, ketenagalistrikan, minyak bumi dan gas bumi khususnya dengan mekanisme PPP (*Public Private Partnership*).

Peningkatan kerjasama dengan Indonesia diharapkan dapat mengisi jurang antara kebutuhan energi dengan penyediaan sumber energi, termasuk pencarian cadangan sumber energi yang baru di Myanmar. Di sektor Migas, Zay memaparkan rencana Myanmar untuk membangun terminal LNG, *Floating Storage Regasification Unit (FSRU)*. Myanmar bekerjasama dengan WorldBank menyusun studi kelayakan atas infrastruktur migas dan akan segera diluncurkan hasilnya.

Di sektor ketenagalistrikan, hingga saat ini rasio elektrifikasi Myanmar masih sekitar 34%. Hal ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi pemerintahan baru Myanmar untuk melayani masyarakatnya yang hidup tersebar di berbagai pelosok dan belum dapat akses tenaga listrik. Zay mengungkapkan strategi jangka panjangnya khususnya terkait pemanfaatan energi terbarukan *hydropower* yang memanfaatkan potensi air Sungai Irrawadi yang membentang dari utara hingga selatan Myanmar. Namun pengembangan energi terbarukan tersebut mendapat tantangan dari berbagai pihak khususnya terkait relokasi penduduk yang akan terkena dampak dari pembangunan.

Sebagai tanggapan, Jarman mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai pengguna batubara sebagai tulang punggung penyediaan energi nasional juga menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, khususnya terkait pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai tantangan tersebut tidak menyurutkan niat kedua negara untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang tersedia untuk kemakmuran masyarakat. (RBS/PSJ)

# Indonesia dan Korea Selatan Tingkatkan Kerjasama Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dan Migas

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad mewakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerima delegasi Korea Selatan pada hari Selasa (19/7). Munir didampingi oleh para Inspektur Ketenagalistrikan dan Inspektur Migas, sedangkan rombongan dari Korea Selatan diwakili oleh Han Jin Hyun dari *Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE)*, Kim Sung Soo dari *Korea Electrical Safety Corporation (KESCO)*, Kim Sung Moon dari *Korea Gas Safety Corporation (KGSC)* serta Song Yo Han dari Kedutaan Besar Korea di Indonesia. Pertemuan bilateral ini dilakukan dalam rangka menjalin kerjasama bidang sistem manajemen keselamatan di sektor ketenagalistrikan dan migas antara Indonesia dan Korea Selatan.

Pertemuan yang digelar di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta Selatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan *The 1<sup>st</sup> Korea-ASEAN Energy Safety Policy Forum for Establishing Integrated and Sustainable Energy Safety Cooperation* tanggal 6 s.d 8 April 2016 di Incheon, Korea Selatan. Pertemuan pendahulu tersebut dihadiri oleh Inspektur Ketenagalistrikan dan Inspektur Migas yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara ASEAN dan Korea Selatan di bidang sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan dan migas.

Munir menjelaskan bahwa pada pertemuan antara KESDM dan delegasi Korea Selatan tersebut dilakukan pembahasan rencana kerjasama yang meliputi peningkatan regulasi, standarisasi, kompetensi dan administrasi bidang keselamatan ketenagalistrikan dan migas.

"Selain itu dilakukan pengembangan kapasitas Inspektur Ketenagalistrikan dan Migas melalui pendidikan, pelatihan, maupun studi banding serta penerapan teknologi dan metoda inspeksi ketenagalistrikan dan migas," Munir menjelaskan.



*Han Jin Hyun (kiri) dan Munir Ahmad (kanan) saling memberikan cinderamata usai pertemuan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia.*

Rencana kerjasama tersebut akan dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan MOTIE Korea Selatan yang menjadi payung kerjasama antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan KESCO dan Direktorat Jenderal Migas dengan KGSC yang melibatkan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KESDM untuk meningkatkan kerjasama yang lebih komprehensif di bidang Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dan Migas. Munir berharap kerja sama ini dapat ditandatangani pada pertemuan *Indonesia and Korea Energy Forum (IKEF)* yang akan diselenggarakan pada bulan September 2016 di Seoul, Korea Selatan.

Munir menegaskan bahwa kerjasama ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi Inspektur Ketenagalistrikan dan Inspektur Migas dalam kegiatan pengawasan keteknikan sektor ketenagalistrikan dan migas di Indonesia. (WPN/PSJ)

# Ditjen Ketenagalistrikan Selenggarakan *Workshop on Renewable Energy dan Energy Efficiency and Conservation*



Kasubdit Kerja Sama Ketenagalistrikan Benhur P.L Tobing membuka *Workshop on Renewable Energy dan Energy Efficiency and Conservation*

Dalam rangkaian pertemuan *the 4th BIMP-EAGA PEIC (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area Power and Energy Infrastructure Cluster)* yang berlangsung Rabu (27/7) di Manado, Ditjen Ketenagalistrikan menyelenggarakan *Workshop on Renewable Energy* pada hari Senin (25/7) dan *Workshop on Energy Efficiency and Conservation* pada Selasa (26/7).

Workshop yang dibuka oleh Kasubdit Kerjasama Ketenagalistrikan Benhur P.L. Tobing juga dihadiri oleh perwakilan Filipina, *Asian Development Bank (ADB)*, perwakilan PLN Pusat dan Wilayah, perwakilan *BIMP FC (Facilitation Center)*, perwakilan *BEBC (BIMP EAGA Business Council)* serta pemerintah daerah.

Dalam sambutan pembukaannya, Benhur menyampaikan bahwa dalam perspektif pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi/konservasi energi, BIMP-EAGA sebagai *building bloc* ASEAN dan ASEAN sebagai *big brother* bagi BIMP-EAGA telah memiliki target aspirasi kontribusi energi terbarukan. Ini tercermin dalam bauran energi ASEAN agar dapat mencapai 23% pada tahun 2025 dan target efisiensi/konservasi energi dengan menurunkan intensitas energi hingga 20% pada tahun 2020 berdasarkan level tahun 2005.

Benhur menyampaikan bahwa Indonesia melihat target optimis ini dilingkupi oleh tantangan yang dihadapi bersama,

## Tajuk Utama



Para peserta Workshop yang terdiri dari perwakilan Filipina Asian Development Bank (ADB), perwakilan PLN Pusat dan Wilayah, perwakilan BIMP FC (Facilitation Center), perwakilan BEBC (BIMP EAGA Business Council) serta pemerintah daerah.

sehingga masing-masing negara anggota harus secara aktif berkontribusi mencapainya.

"Indonesia sendiri telah meniti jalan, di antaranya dengan mendorong pemanfaatan 25% energi terbarukan ke dalam program pengembangan tenaga listrik 35.000 MW hingga tahun 2019," papar Benhur.

Dalam sesi presentasi Workshop Energi Terbarukan, Abdi Dharma Saragih, Kasubdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia menyampaikan paparan tentang investasi energi terbarukan di Indonesia yang dapat dikerjasamakan dalam payung kerjasama BIMP-EAGA.

Selanjutnya Romeo Montenegro, *Director for Investment Promotions and Public Affairs of the Mindanao Development Authority (MINDA)* Filipina menyampaikan tentang *One Stop Facilitation and Monitoring Center for Renewable Energy Projects in Mindanao*. Itu adalah fokus kegiatan MINDA di Mindanao sebagai wilayah BIMP-EAGA. Romeo juga menyampaikan kemungkinan kegiatan bersama yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan energi terbarukan.

Pada sesi diskusi, berkembang wacana yang mempertimbangkan potensi kawasan BIMP-EAGA; seperti Manado bersama Tomohon dan Bitung yang telah ditunjuk

sebagai Kota Smart Energy dan Mindanao sebagai tempat dengan sumber energi terbarukan yang terbesar di Filipina.

Para peserta memahami peningkatan kerjasama energi terbarukan seperti membuat inventori proyek energi terbarukan yang telah ada dan yang baru, studi potensi interkoneksi dan berbagi pengalaman praktek, kebijakan dan fasilitasi energi terbarukan.

Diskusi juga membahas tentang upaya menyederhanakan persyaratan dan prosedur investasi energi terbarukan, termasuk membangun pembangkit tenaga listrik dari sumber energi terbarukan. Peserta juga memahami bahwa hal ini bukanlah tugas yang mudah, dengan mempertimbangkan kekhasan fitur dan karakter energi terbarukan. Dalam diskusi juga berkembang ide untuk menilai *Iconic Island* sebagai percontohan dan dapat diterapkan di masing-masing negara BIMP.

Pada Workshop Efisiensi/Konservasi Energi, Pradeep Tharakan (ADB) menyampaikan paparan tentang dukungan ADB terhadap interkoneksi tenaga listrik dalam kawasan BIMP-EAGA. Selanjutnya Farida Zed, Direktur Konservasi Energi Ditjen EBTKE Indonesia memaparkan tentang kebijakan dan peraturan terkait konservasi energi di Indonesia. (RBS)

# Indonesia Tuan Rumah *The 4<sup>th</sup> BIMP-EAGA Power and Energy Infrastructure Cluster (PEIC)*



Delegasi Indonesia sebagai tuan rumah *The 4th BIMP-EAGA PEIC (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area Power and Energy Infrastructure Cluster)*.

Tahun ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menjadi tuan rumah Pertemuan *The 4th BIMP-EAGA PEIC (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area Power and Energy Infrastructure Cluster)* yang diselenggarakan di Manado, Rabu (27/7).

Pertemuan dipimpin oleh Romeo Montenegro, *Director for Investment Promotions and Public Affairs of the Mindanao Development Authority*, atas nama Ketua PEIC, *Department of Energy*, Filipina. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kasubdit Kerjasama Ketenagalistrikan Benhur PL. Tobing. Pada pertemuan tersebut, Brunei Darussalam dan Malaysia tidak dapat hadir.

Romeo dalam sambutan pembukaannya mengharapkan diskusi yang produktif dan konkrit dan dapat dilaksanakan sejalan dengan strategi yang telah diidentifikasi dalam pertemuan *the Strategic Planning Meeting* yang telah berlangsung awal tahun 2016 di Davao City, Mindanao.

Ia juga melihat kemungkinan kerjasama yang dapat dilaksanakan bersama oleh BIMP di bawah panduan kerangka *BIMP-EAGA Vision 2025*, yang dalam konteks lebih luas mengejar integrasi sub-regional di ASEAN.

Pertemuan menyepakati sejumlah revisi atas arah, tujuan, dan strategi, diantaranya yaitu: ketahanan sektor energi dan peningkatan keamanan energi untuk pembangunan

berkelanjutan di kawasan BIMP-EAGA, dimana indikatornya yaitu peningkatan konsumsi energi per kapita dan peningkatan rasio elektrifikasi.

Lebih lanjut, keluaran *Power and Energy Sector*, yaitu (1)mendorong proyek dan studi interkoneksi yang telah ada, (2)mendorong pengembangan proyek energi terbarukan, (3)mempromosikan program efisiensi/konservasi energi di kawasan sub-regional dan merevisi indikator pengembangan dan pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi hambatan dan jurang dalam promosi efisiensi/konservasi, serta pengurangan intensitas energi hingga 20% pada tahun 2025.

Di samping itu, pertemuan juga menyepakati berbagi jaringan dan koordinasi dengan lembaga regional seperti *Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA)*, *ASEAN Center for Energy*, dan *ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)*. (RBS)

# Ditjen Ketenagalistrikan Bagi Pengalaman Reformasi TTL ke ERAV Vietnam



Suasana Video Conference Dirjen Ketenagalistrikan dan ERAV Vietnam, Kamis (18/8).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bekerjasama dengan *World Bank* mengadakan *videoconference* dengan *Electricity Regulatory Authority of Vietnam (ERAV)*, Kamis (18/8). *Videoconference* dimaksudkan dalam rangka berbagi pengalaman keberhasilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melaksanakan reformasi tarif tenaga listrik (TTL) dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman mewakili Kementerian ESDM membagi pengalaman bagaimana Pemerintah Indonesia melakukan reformasi tarif tenaga listrik beberapa tahun terakhir. Jarman dalam penjelasannya menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap tarif tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan parlemen. Selain itu, Indonesia menerapkan subsidi listrik bagi

masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, penyesuaian TTL dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun sejak 2013.

"Kelompok pelanggan yang disesuaikan TTL-nya pun bertahap, 4 golongan pelanggan pada 2013, dilanjutkan dengan 8 golongan pelanggan di 2014. Sehingga sejak 2015 telah ada 12 golongan pelanggan non-subsidi dan terhadapnya diterapkan tarif keekonomian dan mekanisme *automatic tariff adjustment*," papar Jarman.

Dengan diberlakukannya mekanisme *automatic tariff adjustment* ini, maka perubahan biaya penyediaan listrik akibat faktor-faktor di luar kendali PLN seperti nilai tukar (Rp/US Dollar), harga minyak mentah Indonesia (ICP), maupun tingkat inflasi, akan disesuaikan dalam tarif yang dibayarkan 12 golongan pelanggan tersebut. Penerapan tarif keekonomian ini juga bertujuan memacu PLN untuk

mengefisienkan biaya-biaya agar margin keuntungan dari pelanggan non-subsidi dapat ditingkatkan. "Semakin efisien biayanya, keuntungan yang didapat PLN akan bertambah," jelasnya.

Dengan melakukan reformasi tarif ini, Jarman mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia berhasil menekan subsidi listrik yang pada tahun 2013 mencapai puncaknya yaitu sebesar Rp103,3 triliun menjadi Rp56,5 triliun atau turun setengahnya pada tahun 2015. Hal ini disebutnya berdampak positif dalam memperluas ruang fiskal dalam APBN. Porsi energi listrik (kWh) yang disubsidi pun berhasil dikurangi menjadi tinggal sepertiga dari total penjualan PLN.

Jarman menjelaskan Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan dengan mereformasi tarif secara bertahap. Reformasi tarif ini diharapkan dapat diikuti oleh peningkatan kemampuan penyedia listrik dalam rangka memperbaiki mutu pelayanan kepada pelanggan dan tentunya berdampak pada terjaminnya usaha penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.

Pihak ERAV yang saat ini juga sedang berupaya melakukan penyesuaian tarif di Vietnam mengaku sangat berterimakasih atas *sharing* pengalaman dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Pengalaman Indonesia dalam keberhasilan mereformasi tarif listrik menjadi masukan yang sangat berharga bagi mereka. (DFS)

# Rasio Elektrifikasi Banten Capai 94,78%



*Bersama-sama bersinergi meningkatkan keandalan pasokan listrik di Banten.*

Rasio elektrifikasi atau perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dan total rumah tangga di provinsi Banten hingga akhir tahun 2015 mencapai 94,78%. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman saat mendampingi kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Banten mengungkapkan bahwa capaian tersebut bisa terus naik jika program listrik perdesaan (lisdas) berjalan sesuai dengan rencana. "Dengan program lisdas, ketimpangan Banten Utara dan Selatan dapat diminimalisir," Jarman menjelaskan.

Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Syaikhul Islam Ali pertama-tama bertemu dengan Gubernur Banten Rano Karno sebelum mengunjungi PLTU Suralaya, Senin (1/8). Rano Karno menyambut baik kunjungan kerja tersebut dan berharap beberapa persoalan sektor energi di Provinsi Banten dapat ditemukan jalan keluarnya dengan kunjungan ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta menjelaskan bahwa di Provinsi Banten terdapat beberapa pembangkit listrik yang

menghasilkan energi untuk memenuhi kebutuhan Banten dan Luar Banten melalui jaringan interkoneksi Jawa Bali. "Pembangkit tersebut terletak di Suralaya, Lontar, Labuhan, dan Cilegon," ungkap Ranta.

Dalam presentasinya, Ranta menjelaskan bahwa program lisdas di Banten mendapat kendala dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. "Peraturan tersebut mengatur hibah hanya dapat diberikan pada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum," papar Ranta. Dengan terbitnya aturan ini, program lisdas terkait instalasi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu dan nelayan harus disalurkan melalui lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Juli lalu telah diselenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi yang salah satunya membahas kendala dana hibah ini. Menurut Jarman, sesuai penjelasan

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjiyanto, Dinas ESDM yang akan mendistribusikan bantuan listrik perdesaan cukup menunjuk lembaga yang disahkan oleh Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) masing-masing.

Kunjungan kerja berakhir dengan kunjungan ke PLTU Suralaya dan mendengarkan paparan dari Direksi PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat & Lampung PT PLN, Murtaqi Syamsudin menyampaikan paparan mengenai RUPTL 2016-2025 Sistem Jawa Bali dan Kelistrikan Banten Regional Jawa Bagian Barat. Sedangkan GM Unit Pembangkitan Suralaya M. Hanafi Nur Rifai menjelaskan mengenai profil pembangkit-pembangkit yang ada di PLTU Suralaya.

Kapasitas total PLTU Suralaya saat ini mencapai 4.025 MW yang terdiri dari empat pembangkit berkapasitas 400 MW, tiga pembangkit berkapaistas 600 MW, serta satu pembangkit berkapasitas 625 MW.

Di provinsi Banten, menurut Murtaqi akan masuk empat pembangkit besar dan penguatan *backbone* 500 kV yaitu PLTU Banten 1x600 MW, PLTU Jawa-7 2x1000 MW, PLTU Jawa-9 1x600 MW, serta PLTU Jawa-5 2x1000 MW 2019. Untuk Kawasan Tanjung Lesung yang akan dibangun Kawasan Ekonomi Khusus, Murtaqi menjelaskan bahwa akan dibangun Gardu Induk Tanjung Lesung 2X60 MVA Tahun 2018 yang telah Tertuang dalam RUPTL 2015-2024.(PSJ)

# Pemerintah Targetkan 7000 MW

## *dari Panas Bumi pada 2025*



Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan Pemerintah bertekad mengembangkan energi panas bumi di Indonesia.

Indonesia mempunyai potensi panas bumi 29 gigawatt (GW), namun hingga kini produksi listrik dari panas bumi baru sebesar 1.494 megawatt (MW) atau 5% dari total potensi. Untuk memaksimalkan potensi, Pemerintah bertekad mengembangkan energi panas bumi demi mencapai target 7000 MW pada 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyampaikan hal tersebut dalam *The 4th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2016* bertempat di *Jakarta Convention Center (JCC)* (10/8).

Arcandra menyampaikan bahwa sesuai Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah dituntut mempercepat pengembangan energi terbarukan Indonesia. Saat ini pemanfaatan energi terbarukan hanya 5%, namun dalam Rencana Umum Energi Nasional, porsi energi terbarukan akan ditingkatkan menjadi 23% dari total bauran energi nasional

pada 2025. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Pemerintah terus berusaha mengatasi masalah yang selama ini menghambat pengembangan panas bumi.

"Panas bumi kini tidak lagi diklasifikasikan sebagai usaha pertambangan. Ini memungkinkan perusahaan panas bumi di kawasan hutan," ujar Arcandra. Ia menambahkan, 40% dari panas bumi Indonesia terletak di kawasan hutan.

Dukungan masyarakat juga menjadi perhatian Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Panas Bumi diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap area potensi panas bumi. Saat ini, ujar Arcandra, Pemerintah tengah menyusun peraturan pemerintah yang mengatur

pemanfaatan tidak langsung dan pemanfaatan langsung. Arcandra berharap kedua peraturan tersebut bisa terbit tahun ini.

Lebih lanjut, Arcandra mengungkapkan Pemerintah memiliki tiga terobosan untuk pengembangan panas bumi, yakni 1) penugasan panas bumi pada BUMN dan BLU, 2) kebijakan *feed in tariff* atau *fixed price* untuk pengembangan panas bumi, dan 3) penugasan survey pendahuluan dan eksplorasi.

Selain itu, Arcandra juga menjelaskan transformasi sektor ESDM yang akan lebih memberikan perhatian pada tiga pilar utama, yakni transformasi bisnis proses, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, dan pemanfaatan teknologi. Ia berharap hal tersebut dapat membuka hambatan-hambatan yang selama ini ada.

IIGCE 2016 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM bekerja sama dengan Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Tahun ini IIGCE berlangsung pada 10-12 Agustus 2016. Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla dan dihadiri oleh duta besar negara sahabat, pimpinan komisi VII DPR RI serta anggota DPR RI, pimpinan BUMN, perwakilan daerah dan *stakeholder* lainnya. (AMH)

# Wapres: Jika Ingin Setara Dengan Negara Lain, Program 35.000 MW Harus Didukung

Program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW merupakan suatu kebutuhan bangsa. Jika ingin Indonesia sejajar dengan negara-negara lain di Asia, program ini harus didukung bersama. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat membuka *The 4<sup>th</sup> Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2016*, di *Jakarta Convention Center (JCC)*, Rabu (10/8).

"Tiga puluh lima ribu megawatt itu adalah suatu keharusan, kebutuhan, apabila kita ingin sejajar dengan negara-negara lain di Asia ini atau maju sama dengan negara lain," jelas Kalla. Menurutnya saat ini Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara lain jika dilihat dari sisi rasio elektrifikasi, tingkat konsumsi listrik, ataupun daya saing industri.

Menurut Wapres, program ini bukanlah suatu hal yang ambisius karena merupakan sesuatu hal yang terukur. "Pemerintah punya program yang kata banyak orang ambisius. Tapi saya katakan itu bukan ambisius. Itu belum ambisius, hanya sesuai kebutuhan karena kita masih jauh kekurangan listrik. Itu hanya kebutuhan yang harus kita penuhi," ungkapnya.

Ia melihat bahwa pembangunan ini mendukung sektor industri yang membutuhkan listrik yang handal. "Apabila ingin sejajar dengan negara lain di Asia ini, dan ingin memenuhi kebutuhan usaha kita yang masih 80% elektrifikasinya ya proyek tersebut harus tercapai," tandasnya.

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa saat ini listrik telah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat. Bahkan menurutnya listrik dianggap lebih penting dibandingkan dengan pemenuhan sembilan bahan pokok makanan bagi sebagian kalangan.

"Karena orang kampung pun tanpa listrik dia marah-marah.

Karena tidak bisa menghubungi (kerabatnya) lagi," kata Kalla.

JK menilai sebenarnya dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia lebih banyak memiliki sumber primer tenaga penghasil listrik. "Kalau kita bicara *fossil oil*, kita menyebut batubara yang melimpah. Kita punya gas. Kita punya *oil*, tentu meyakinkan. Kita mempunyai dasar yang kuat untuk itu," ujarnya.

Selain itu Jusuf Kalla menjelaskan bahwa Indonesia juga kaya akan potensi energi baru terbarukan. Ia mengatakan, salah satu potensi energi terbarukan yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan adalah energi panas bumi.

"Bagi masyarakat negeri kita ini, kita ingin suatu negeri yang maju tapi bersih dan hidupnya lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya mengharapkan *geothermal* menjadi bagian yang menjadi prioritas," katanya.

Potensi panas bumi di Indonesia disebutnya hampir mencapai 30.000 MW. Sayangnya Indonesia baru memanfaatkan sedikit dari potensi yang ada. Hingga tahun ini baru 1.494 MW atau hanya lima persen dari potensi keseluruhan panas bumi yang sudah dimanfaatkan.

Energi terbarukan menjadi pilihan prioritas pemerintah sebab dinilai lebih sehat dan bersih dibandingkan energi fosil. Pemerintah mendorong investasi di sektor energi khususnya pemanfaatan energi panas bumi yang hingga saat ini belum terserap secara maksimal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menjelaskan, sejumlah langkah sudah dijalankan dan disiapkan pemerintah untuk mendorong lebih banyak lagi pengembangan panas bumi agar bisa termanfaatkan.



Wapres Jusuf Kalla membuka The 4<sup>th</sup> Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2016, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/8).

Beberapa langkah tersebut diantaranya memberikan penugasan pengusahaan panas bumi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). Candra menilai, langkah ini merupakan suatu hal yang efisien agar wilayah kerja panas bumi dapat segera dikembangkan dari tahap eksplorasi sampai pemanfaatan.

Langkah kedua menurut Menteri ESDM adalah penyusunan harga jual listrik panas bumi dengan skema *feed-in tariff* dinilai lebih memfasilitasi keekonomian pengembang panas bumi. Sedangkan langkah ketiga adalah pemerintah membuka peluang bagi pengembang panas bumi untuk mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi sekaligus melakukan tahapan eksplorasi. Dengan ketiga langkah ini pengembang akan mendapatkan keistimewaan dalam tahap lelang melalui mekanisme Pelelangan Wilayah Kerja hasil Penugasaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE).(PSJ)



Wapres Jusuf Kalla meninjau booth Kementerian ESDM di ajang IIGCE 2016

# Sukseskan 35.000 MW, Pemerintah Keluarkan Regulasi dan Deregulasi



Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyampaikan sambutan dalam Pertemuan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Selasa (31/5)

Untuk menyukseskan program percepatan pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW, pemerintah telah menyiapkan regulasi dan deregulasi untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang ada. Belajar dari program percepatan pembangunan ketenagalistrikan (*fast track programme/ FTP*) Tahap I dan II, permasalahan yang biasa terjadi adalah pengadaan tanah, perizinan, perencanaan yang kurang siap dan kemampuan kontraktor.

Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, perencanaan yang disusun dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sangat penting dalam pelaksanaan Program 35.000 MW, karena merupakan

dokumen yang mencatat proyek-proyek yang akan ditawarkan.

Hal tersebut disampaikan Jarman dalam Pertemuan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Selasa (31/5). Pertemuan tersebut untuk mengurai masalah dan mencari solusi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Selain Dirjen Ketenagalistrikan, Pertemuan di BPK ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Wakil Ketua BPK

## Warta Kita



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi 2019 sebesar 97%.



Panitia menyampaikan kenang-kenangan kepada Dirjen Ketenagalistrikan selaku narasumber.

Sapto Amal Damandari, perwakilan DPR RI, akademisi, dan direksi PT PLN (Persero). Menurut Sapto, BPK melakukan transformasi dari administrasi ke substansi. BPK menurutnya ikut mendorong pemerintah memperbaiki kualitas kebijakan publik, dimana salah satu program prioritas pemerintah yang mendapat pengawalan dari BPK adalah program 35.000 MW.

"Melalui koordinasi ini diharapkan agar masing-masing instansi dapat mengetahui batas masing-masing tugas, menyamakan pandangan atas permasalahan agar pemangku kepentingan dapat dilayani," jelas Sapto.

Menurut Sapto, sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPK telah melaksanakan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas 'Penyelesaian Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan Eks Dana APBN TA 2011 sampai dengan 2014 yang terhenti' yang meliputi 166 kontrak yang menjadi penyokong utama FTP I 10.000 MW.

Dalam presentasinya, Jarman mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memantau kondisi kelistrikan setiap hari. Menurutnya angka rasio elektrifikasi dan konsumsi per kapita Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.

"Rasio Elektrifikasi kita terus tingkatan karena rakyat

mempunyai hak atas tenaga listrik," tegas Jarman. Tantangan ke depan yang harus diselesaikan pemerintah adalah rasio elektrifikasi tahun 2019 yang ditargetkan mencapai 97%. Hal ini menurutnya adalah tantangan yang berat karena sisa 12% adalah masyarakat yang tinggal di daerah *remote*, khususnya di Indonesia bagian timur.

Untuk mengejar percepatan pembangunan ketenagalistrikan, menurut Jarman program listrik perdesaan harus tetap harus dijalankan oleh PT PLN (Persero) dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Jarman juga meminta semua pihak khususnya pemerintah daerah untuk membantu mencari solusi terlebih dalam pengadaan lahan pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi.

Dalam kesempatan tersebut terlihat sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dan sejumlah kepala daerah lainnya. Pertemuan koordinasi ini dikemas dalam dua sesi dengan Effendi Ghazali sebagai moderator diskusi.(PSJ)

# Dirjen Ketenagalistrikan Temui Asosiasi Dinas Pengelola ESDM Provinsi Se-Indonesia



Asosiasi Dinas Pengelola ESDM Provinsi Se-Indonesia (ASPESDMPI) diterima oleh Dirjen Ketenagalistrikan, Selasa (1/6).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, pada hari Selasa (1/6) bertempat di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta menerima Asosiasi Dinas Pengelola ESDM Provinsi Se-Indonesia (ASPESDMPI). Dalam kunjungan tersebut, Jarman didampingi Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad dan jajaran Ditjen Ketenagalistrikan. Hadir berkunjung, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sekaligus ketua ASPESDMPI Dewi J Putriatni dan beberapa perwakilan Kepala Dinas Provinsi seperti Provinsi Jawa Barat, Banten, Riau, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat.

Tujuan dari pertemuan tersebut menurut Dewi adalah untuk membahas kondisi dan permasalahan terkini terkait permasalahan ketenagalistrikan dan usulan solusinya. Dalam kesempatan tersebut, Jarman

menerima beberapa masukan dan usulan pengelolaan ketenagalistrikan di daerah yang disampaikan oleh ASPESDMPI. Beberapa hal yang menjadi harapan ASPESDMPI adalah perlunya pendampingan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).

"Kami berharap ada pendampingan untuk penyusunan RUKD," papar Dewi. ASPESDMPI juga berharap adanya suatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) khusus untuk dinas ESDM Provinsi se-Indonesia.

Dalam tanggapannya Jarman menyampaikan beberapa kebijakan yang dapat ditangani oleh Dinas ESDM Provinsi seperti pemberdayaan inspektur ketenagalistrikan untuk memantau pembangunan infrastruktur

ketenagalistrikan di daerah serta pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah. "PPNS perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya," jelas Jarman.

Dinas ESDM Provinsi menurut Jarman juga diharapkan dapat terlibat dalam mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan melalui pengawasan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang ada di wilayah masing-masing. Saat ini pemerintah tengah menugaskan PT PLN (Persero) untuk mewujudkan Pelayanan Satu Pintu Sambungan Listrik yang terintegrasi antara pelayanan online yang dilakukan Lembaga Inspeksi Teknik, PLN, dan pemerintah. Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi, beberapa hal yang dibahas dan diusulkan adalah penyediaan dana untuk pembangunan jaringan distribusi dan instalasi listrik untuk masyarakat tidak mampu.

Pertemuan singkat ini penuh dengan pembahasan menarik mengenai kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah di subsektor ketenagalistrikan. Dengan pertemuan ini, Jarman berharap komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam pengelolaan ketenagalistrikan dapat terus terjalin. (PSJ)

# Menteri ESDM Lantik 37 Pejabat Ditjen Ketenagalistrikan



431 orang pejabat struktural dilantik oleh Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (20/7).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, melantik 431 orang Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Kementerian ESDM, Rabu (20/7). Pelantikan diselenggarakan di Gedung Arsip Kementerian ESDM di Pondok Ranji, Tangerang. Dari seluruh pejabat yang dilantik, Menteri ESDM melantik 37 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Tiga puluh tujuh pejabat tersebut terdiri dari 15 orang pejabat administrator (Eselon III) serta 22 orang pejabat pengawas (Eselon IV). Pejabat yang dilantik tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 6077 K/73/SJN/2016 (eselon II), 6078 K/73/SJN/2016 (eselon III) dan 6090 K/73/SJN/2016 (eselon IV).

Pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Kementerian ESDM ini merupakan bagian dari penataan dan penyegaran organisasi dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian ESDM. Pelantikan ini merupakan pelantikan terbesar kedua setelah pada bulan Juni 2015 lalu Menteri ESDM melantik 362 orang pejabat eselon III dan IV KESDM.

Sudirman menjelaskan bahwa pegawai yang mendapat amanah adalah lini terdepan dalam pencapaian kinerja Kementerian ESDM. Mereka harus mampu menjadi agen perubahan dan melakukan inovasi terhadap upaya-upaya perbaikan sesuai bidang tugas masing-masing. Di awal mengemban amanat, tantangan terbesar adalah menyamakan visi, pikiran,

meningkatkan engagement dan menumbuhkembangkan rasa saling menghormati untuk mencapai tujuan bersama.

Lebih lanjut, Sudirman meyakinkan bahwa dengan kelurusan niat dan dukungan dari seluruh elemen di Kementerian ESDM, hal yang sulit dan tampaknya mustahil, dapat dilaksanakan dengan baik. Tantangan ke depan yang menjadi pekerjaan bersama adalah melanjutkan reformasi energi dengan menjaga integritas, konsistensi dan kompetensi untuk menghilangkan vested interest, politik populis serta cara pandang yang sempit (*myopic*).

Sebagai penutup Menteri ESDM mengucapkan selamat dan mengungkapkan harapan kepada pejabat yang dilantik. "Selamat bekerja, kepercayaan yang diberikan mengandung tanggung jawab yang besar dan menuntut perlunya kerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas ke depan yang semakin berat dan terus menjaga kementerian ini *on the right track*", tutup Sudirman.(PSJ)

# PPNS Ketenagalistrikan Gelar Workshop Tindak Pidana di Manado



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman membuka Workshop Tindak Pidana di Bidang Ketenagalistrikan, Kamis (2/6).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM pada hari Kamis (2/6), bertempat di Hotel Aryaduta, Manado, menyelenggarakan 'Workshop Tindak Pidana di Bidang Ketenagalistrikan'. Workshop tersebut dihadiri sekitar 80 orang peserta yang diundang dari PPNS di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Korwas PPNS Bareskrim Polri, Polda Sulawesi Utara, serta PT PLN (Persero) Kantor Pusat dan Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. Tujuan penyelenggaraan workshop ini adalah meningkatkan sinergitas penegakan hukum antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan, dan POLRI khususnya di bidang ketenagalistrikan.

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan bahwa efisiensi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik menjadi perhatian Pemerintah. Salah satu faktor yang mempengaruhi BPP adalah susut jaringan tenaga listrik (*losses*).

"BPP dapat ditekan dengan upaya penurunan *losses* oleh PLN. *Losses* 1% setara dengan Rp3 triliun," jelas Jarman.

*Losses* menurut Jarman terdiri dari *losses* teknis dan *losses* nonteknis. *Losses* teknik terjadi secara alamiah dikarenakan sifat material penghantar, namun *losses* nonteknis terjadi terutama karena adanya pencurian listrik atau pemakaian listrik secara ilegal. Pemakaian listrik ilegal ada yang dilakukan tanpa sengaja, untuk ini dikenakan denda, namun apabila ada unsur kesengajaan, "Maka selain didenda, dikenakan juga pidana sesuai Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, untuk memberikan efek jera pada pelaku," tegas Jarman.

Menurut Jarman, pihaknya saat ini menekankan perlunya peningkatan kemampuan penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan, khususnya dalam penanganan tindak pidana pencurian listrik ilegal. Dengan peningkatan tersebut diharapkan *losses* nonteknis dapat ditekan.

Apabila *losses* dapat diturunkan, menurut Jarman BPP akan semakin efisien sehingga margin keuntungan PLN akan meningkat. "Selain itu subsidi listrik dari Pemerintah terhadap sepertiga penjualan listrik PLN akan berkurang," jelasnya.

Hadir sebagai pembicara antara lain Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu, Analis Kebijakan Madya Pidana Umum Biro Korwas Bareskrim Polri Kombes Pol. Krisno Siregar, Kasie Korwas PPNS Polda Metro Jaya Kompol Mujiyono, SH, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara B.M Syarizal, serta Fungsional Ahli Bidang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Bintoro Suryo Sudiby. Workshop yang berjalan satu hari ini memberikan pencerahan pada pentingnya penanganan tindak pidana pada sektor ketenagalistrikan.(DFS/PSJ)

# Dirjen Ketenagalistrikan Tinjau Pusat Pengatur Beban

Di sela-sela agenda kegiatan Workshop Tindak Pidana Ketenagalistrikan di Manado, Sulawesi Utara pada hari Kamis (2/6), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman melakukan kunjungan ke Pusat Pengatur Beban Sistem Minahasa PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kedatangan Jarman dan rombongan adalah untuk meninjau kesiapan operasi pembangkit tenaga listrik yang terinterkoneksi dengan jaringan transmisi tenaga listrik Sistem Minahasa untuk menyuplai kebutuhan beban listrik Sulawesi Utara dan Gorontalo.



*Kunjungan ke Pusat Pengatur Beban Sistem Minahasa PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo di sela-sela Workshop Tindak Pidana Ketenagalistrikan.*

Sebagai informasi, beban puncak sistem Minahasa saat ini mencapai 332 MW dengan daya mampu pasok 365 MW, sehingga cadangan daya listrik sistem Minahasa sebesar 33 MW (9,9%). *Mobile Vessel Power Plant* (MVPP) 120 MW di Amurang, Sulawesi Utara dan PLTG Peaker 100 MW di Marisa, Gorontalo telah beroperasi untuk membantu kecukupan pasokan daya listrik Sistem Minahasa.

Menurut Jarman, cadangan daya listrik di Minahasa 9,9% perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai 30%. Selain itu menurutnya jaringan transmisi tenaga listrik harus mencapai N-1 untuk menjaga keandalan pasokan daya listrik dari kemungkinan pemeliharaan dan gangguan pada instalasi tenaga listrik.

Dalam kesempatan tersebut Jarman menegaskan bahwa PLN harus menaati *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik yang sesuai dengan standar dan kaidah teknis yang berlaku. "Hal ini penting untuk meningkatkan dan mempertahankan

keandalan sistem kelistrikan dengan cadangan daya listrik yang cukup," jelas Jarman.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2016, menurut Jarman PT PLN perlu memperhatikan besaran kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang harus diberikan kepada pelanggan. TMP ini menurut Jarman digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan besarnya investasi untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan keandalan instalasi tenaga listrik. (WPN/PSJ)

# PRESIDEN JOKOWI RESMIKAN PLTG GORONTALO 100 MW

*Presiden Jokowi meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Paguwat, Pohuwanto, Gorontalo, Sulawesi Utara (3/6).  
[Sumber foto: <https://www.jurnalasia.com>]*



Presiden Joko Widodo pada hari Jumat (3/6) meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Paguwat, Pohuwanto, Gorontalo, Sulawesi Utara. Peresmian di Gorontalo ini merupakan salah satu agenda dari kunjungan kerja Presiden di hari ketiga setelah Aceh dan Kalimantan Barat. Kunjungan kerja ini difokuskan untuk mengatasi ketersediaan listrik. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Dirut PLN Sofyan Basir dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.

PLTG Gorontalo berkapasitas 100 MW ini merupakan proyek pertama yang beroperasi dari keseluruhan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Pembangunan proyek PLTG Gorontalo 4 x 25 MW ini relatif cepat. Sejak dilakukan *groundbreaking* pada 19 september 2015, dalam waktu 7 bulan, PLN berhasil merampungkan seluruh pengerjaannya. PLTG Gorontalo telah melayani kebutuhan listrik masyarakat sejak 11 April 2016. PLTG ini menjadi jawaban kebutuhan listrik di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo), khususnya Gorontalo dan mampu meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 84,4 persen.

Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo mengapresiasi

cepatnya pembangunan PLTG Gorontalo. Selain itu Presiden menekankan pentingnya listrik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Tanpa listrik investor tidak akan masuk, tanpa listrik industri tidak akan berkembang," kata Jokowi.

Mengingat pentingnya listrik bagi kehidupan masyarakat, maka Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 untuk mempercepat infrastruktur kelistrikan. Menurut Presiden kebijakan ini perlu dukungan semua pihak dan harus dioptimalkan.

Saat ini beban puncak listrik pada subsistem kelistrikan Gorontalo adalah 85 MW dengan jumlah pelanggan hingga akhir Mei 2016 mencapai 235.000 pelanggan. Dengan beroperasinya PLTG Gorontalo akan sangat membantu dalam memenuhi permintaan pelanggan baru hingga 35.000 pelanggan di seluruh Provinsi Gorontalo. Selain itu, PLTG Gorontalo juga berperan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Utara melalui sistem interkoneksi kelistrikan Sulawesi Utara-Gorontalo 150 kilovolt. Total keseluruhan daya mampu sistem Sulutgo saat ini sebesar 368,65 MW dengan beban puncak mencapai 319,68 MW. Ini artinya ada cadangan listrik sebesar 49,57 MW.(PSJ)

# Presiden Jokowi Resmikan *Groundbreaking* PLTU Lontar Unit 4



Presiden Jokowi melakukan *groundbreaking* PLTU Lontar Unit 4 di Tangerang, Banten (10/6).  
[Sumber foto: <http://www.pikiran-rakyat.com>]

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Soemarno, meresmikan dimulainya pembangunan PLTU Lontar Unit 4 (10/6). Pembangkit listrik berkapasitas 315 MW ini terletak di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. PLTU Lontar merupakan salah satu proyek dari PT PLN (Persero) Unit Induk Jawa Bagian Barat untuk memasok 3 subsistem yaitu Balaraja, Subsistem Kembangan serta Subsistem Muara Karang-Gandul.

Proyek PLTU Unit 4 ini merupakan lanjutan dari proyek existing PLTU Unit 1,2 dan 3 dengan kapasitas total sebesar 3 x 315 MW yang saat ini telah beroperasi dan sudah masuk sistem kelistrikan Jawa-Bali. Pengembangan PLTU Lontar Unit 4 ini merupakan bagian solusi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat.

"Kebutuhan listrik terus meningkat, sampai dengan tahun 2019 saja itu masih membutuhkan kurang lebih 21.000 MW dan itu kebutuhan yang sangat besar sekali yang harus dikejar, kebutuhan yang harus segera dipercepat pembangunannya," ujar Presiden Jokowi.

Menurutnya pelaksanaan pembangunan kelistrikan harus dipercepat karena kalau tidak, nanti 2019 akan ada kekurangan listrik di Jawa dan Bali.

Selain melakukan *groundbreaking* PLTU Lontar *extention* 1x315 MW, Presiden juga melakukan *groundbreaking* dan peresmian proyek kelistrikan untuk memperkuat Sistem kelistrikan Jakarta-Banten. Beberapa proyek tersebut adalah SUTET 500 kV Bojanegara-Suralaya, SKTT 150 kV Muara Karang Baru-Muara Karang Lama, Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria, serta GIS 150 kV Depok Baru II.

Secara bersamaan Presiden juga meresmikan Gardu induk dan transmisi, dimana keseluruhan proyek yang diresmikan telah beroperasi di Wilayah Banten dan DKI Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Jokowi menjelaskan bahwa program 35.000 MW merupakan kebutuhan yang harus diselesaikan.

"Saya ngotot proyek 35.000 MW diseluruh Indonesia ini harus dipercepat, harus segera dikerjakan karena kalau kita liat malam hari dari atas Indonesia banyak wilayah-wilayah yang masih gelap, artinya masih banyak yang masih membutuhkan listrik," ujar Jokowi.

Ia melanjutkan, "Kita tidak mau kalah dengan negara lain. Negara lain terang-benderang, Indonesia juga terang-benderang. Dan saya sudah perintahkan Menteri ESDM, tahun ini, listrik-listrik masuk ke desa-desa yang belum terlistriki," lanjut Jokowi.

Jokowi menambahkan, listrik juga diperlukan kalangan investor dan jika listriknya tidak mencukupi maka investor enggan untuk menanamkan investasinya dan akhirnya menanamkan investasinya ke Negara lain. "Jadi betapa pentingnya yang namanya listrik. 35.000 MW itu bukan target tapi kebutuhan dan jika ini tidak terealisasi daerah-daerah akan byarpet-byarpet," sambungnya.(PSJ)

# Kunjungi Bali, Presiden Jokowi Tinjau PLTDG Pesanggaran 200 MW



Presiden Jokowi meninjau pengoperasian PLTDG Pesanggaran di Bali (12/6).  
[Sumber foto: <http://geoenergi.co.id>]

Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Sabtu (12/6), Presiden Joko Widodo meninjau pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Pesanggaran berkapasitas 200 MW. Selain meninjau mesin pembangkit di Pesanggaran, Presiden yang didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, juga mengunjungi *storage* LNG di Pelabuhan Benoa yang berjarak kurang lebih 2 kilo meter dari pembangkit Pesanggaran.

Dalam peninjauan tersebut Presiden menjelaskan bahwa penggantian diesel ke gas ini sangat efisien. "Ini mengganti dari yang sebelumnya diesel dipindah ke gas. Dan itu bisa menghemat perharinya Rp 4 miliar perhari. Sangat efisien sekali ini, kalau nanti ini baik saya kira yang diesel yang di pulau-pulau itu akan kita satu persatu kita pindahkan, kita transfer ke gas," kata Presiden. Pasokan mini gas LNG di PLTDG Pesanggaran ini membuat PT PLN mampu menghemat biaya pemeliharaan hingga Rp 60 miliar.

PLTDG Pesanggaran yang dipasok dari mini LNG dipastikan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik pada sistem kelistrikan Jawa-Bali dan yang terutama adalah terciptanya penggunaan energi yang lebih bersih. Penggantian diesel ke mini LNG untuk pembangkit Pesanggaran menurut Menteri ESDM Sudirman Said menandai dimulainya konversi sumber energi yang membawa polusi ke sumber energi yang ramah lingkungan.

"Peristiwa hari ini menandai dimulainya konversi sumber energi dari yang polutif ke yang ramah lingkungan. Dari MFO diesel ke LNG," ujar Sudirman.

Pemerintah sendiri telah mencanangkan Provinsi Bali akan menjadi provinsi yang seluruh pasokan energi didapat dari sumber-sumber energi bersih dan ramah lingkungan di tahun 2019. Saat ini 60% pasokan energi listrik Provinsi Bali sudah didapat dari sumber energi bersih yakni gas bumi. Meski berbasis fosil, gas bumi relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar minyak lainnya. Pasokan listrik di Bali yang saat ini berasal dari pembangkit PLTG Gilimanuk 130 MW, Pembangkit Pemaron 80 MW, PLTU Celukan Bawang 380 MW dan kabel laut Jawa-Bali 340 MW.

Pemerintah menganggarkan dana 2 triliun rupiah untuk proyek pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan di Bali ini. "Pertama kita ingin mempercepat, yang kedua masalah biaya kita lihat agar lebih efisien, dan yang ketiga juga masalah energi baru terbarukan juga menjadi catatan," ujar Jokowi.

PLTDG Pesanggaran terdiri dari 4 blok dimana masing masing blok memiliki tiga unit mesin dengan tiga jenis bahan bakar yaitu *High Speed Diesel* (HSD), *Marine Fuel Oil* (MFO) dan gas. Pembangkit ini dikerjakan oleh konsorsium Wartsila-PT PP; sudah mulai beroperasi pada 4 April 2015 untuk blok 1 dan beroperasi penuh semua blok pada 5 Juni 2015.(PSJ)

# Groundbreaking MPP Jeranjang, Presiden Jokowi Tegaskan Pantau Pembangunan Ketenagalistrikan

Sabtu (11/6) pagi, Presiden Joko Widodo meresmikan *groundbreaking Mobile Power Plant (MPP)* Jeranjang berkapasitas 2x25MW. MPP ini terletak di Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan ia akan melihat langsung ke lapangan perkembangan proyek pembangunan ketenagalistrikan yang tengah dilaksanakan. Selain itu Jokowi mengisyaratkan suatu saat nanti bisa memaksimalkan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna memenuhi tren permintaan listrik yang terus mengalami lonjakan.

Jokowi melihat MPP adalah solusi bagi percepatan infrastruktur ketenagalistrikan di beberapa daerah. MPP dinilai mampu mengejar kecepatan dalam memenuhi kebutuhan listrik yang mendesak, mengingat waktu penyelesaian yang lebih cepat sekitar 6-7 bulan.

"Tapi dalam jangka panjang, kita akan lihat *cost*-nya. Mana yang lebih ekonomis," jelas Jokowi. "Kalau nanti sudah jalan, kita ingin melihat provinsi-provinsi yang kurang itulah yang kita tambah terlebih dahulu, yang kurang dikejar untuk ditambah biar tidak ada byarpet. Kalau sudah cukup, itu yang akan kita perluas lagi," tambah Jokowi. Proses ekspansi, menurutnya harus melihat perkembangan setiap tahun apakah itu akan ada pertumbuhan, ada permintaan sehingga yang sudah cukup ini tetap dihitung lagi.

Pembangunan PLTU Jeranjang ini pembiayaannya terdiri atas dua bagian, yaitu sebesar US\$ 30,7 juta dan Rp 354,3 miliar. Pendanaan tersebut dilakukan PT Barata Indonesia (Persero) menggunakan sistem *turnkey (Engineering Procurement dan Construction/EPC)*.

Mengenai penyelesaian proyek yang berhenti, Presiden menyampaikan bahwa nanti akan dibahas dalam rapat terbatas setelah sebelumnya dicek lagi oleh BPKP. Jokowi juga



Presiden Jokowi menyampaikan bahwa MPP adalah solusi bagi percepatan infrastruktur ketenagalistrikan di beberapa daerah.  
[Sumber foto: <http://setkab.go.id>]

menyampaikan bahwa mengejar kecepatan pembangunan pembangkit listrik sudah tepat menggunakan MPP "Tetapi ke depan karena kita punya potensi air, sungai, *hydro* juga sebentar lagi akan kita tunjukkan dimana nanti yang *hydro*," pungkas Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara peresmian kali ini adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi serta pejabat setempat.(PSJ)

# Menteri ESDM dan Komisi VII DPR RI Gelar Raker Asumsi Dasar APBNP 2016

Menteri ESDM Sudirman Said bersama Komisi VII DPR RI pada Selasa (14/6) melakukan Rapat Kerja dengan tema pembahasan asumsi dasar sektor ESDM RAPBN-P 2016. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR-RI, Gus Irawan Pasaribu, dan dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan para pejabat eselon I dan II Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Pertamina, dan Direktur PT PLN (Persero).

Pada awal rapat, dikarenakan Badan Anggaran DPR-RI memerlukan keputusan segera dari Komisi VII DPR-RI, Gus Irawan Pasaribu menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI dalam rapat internalnya telah memutuskan beberapa hal terkait Asumsi Dasar Sektor Energi RAPBN-P 2016 sebagai berikut: (1)*Indonesian Crude Price* sebesar 45 USD/barrel; (2)*Lifting* minyak bumi 820 ribu BOEPD; (3)*Lifting* gas 1.150 ribu BOEPD; (4)Subsidi solar Rp500/liter; (5)Subsidi listrik Rp38,39 triliun; (6)*Cost recovery* sebesar 9 *billion USD*.

Asumsi dasar tersebut diputuskan dengan beberapa catatan harga solar sampai dengan akhir tahun 2016 tidak mengalami kenaikan, Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak mengalami kenaikan, serta subsidi listrik untuk pelanggan 450VA dan 900VA tidak dicabut.

Padahal dalam paparannya terkait dengan kebutuhan subsidi listrik tahun 2016, Menteri ESDM mengusulkan adanya penerapan subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan penghapusan subsidi listrik bagi rumah tangga mampu daya 900VA dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Juli 2016, sehingga dibutuhkan subsidi listrik sebesar Rp59,04 triliun. Apabila penghapusan subsidi listrik bagi rumah tangga mampu daya 900VA tidak dilaksanakan maka subsidi listrik tahun 2016 akan membengkak menjadi Rp63,74 triliun.

Dengan demikian, setelah Komisi VII DPR-RI hanya menyetujui subsidi listrik tahun berjalan 2016 sebesar Rp38,39 triliun, maka ada kekurangan alokasi subsidi listrik sebesar Rp25,35 triliun (asumsi Kurs Rp. 13.500 dan ICP 35 USD/barrel). Kekurangan ini diharapkan dapat dialokasikan pada rapat pembahasan selanjutnya dengan Badan Anggaran DPR-RI. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sudirman memandang bahwa kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan bersama. "Asumsinya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I di Kementerian ESDM," pungkas Sudirman.(DFS)

# Bahas Subsidi Listrik, Pemerintah dan Banggar DPR Selenggarakan Rapat Koordinasi

Pemerintah bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, pada hari Kamis (16/6) menghadiri rapat untuk membahas asumsi makro RAPBN-P 2016 dimana salah satu yang dibahas adalah besaran subsidi listrik. Rapat yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II ini dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR-RI Said Abdullah, dan dihadiri oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, yang didampingi oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, Direksi PT Pertamina, dan Direksi PT PLN (Persero).

Badan Anggaran DPR-RI (Banggar) menyampaikan bahwa untuk asumsi makro RAPBN-P 2016, Banggar telah memutuskan nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS sebesar Rp13.500/USD, serta harga minyak Indonesia (ICP) sebesar 40 USD/barrel. Dengan asumsi nilai tukar dan harga minyak Indonesia (ICP), Pemerintah menyampaikan bahwa seandainya penerapan subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin daya 900 VA secara bertahap mulai 1 Mei 2016, maka kebutuhan subsidi listrik sebesar Rp56,59 triliun. Apabila penghapusan subsidi listrik bagi rumah tangga mampu daya 900VA tidak dilaksanakan maka subsidi listrik tahun 2016 akan membengkak menjadi Rp65,15 triliun.

Badan Anggaran DPR-R memutuskan bahwa dalam RAPBN-P tahun 2016, alokasi subsidi listrik tahun berjalan sebesar Rp38,39 triliun (sesuai kesimpulan Komisi VII), ditambah kekurangan bayar subsidi listrik tahun 2014 sebesar Rp12,28 triliun, sehingga total alokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp50,67 triliun.

"Kami melihat bahwa dengan kondisi fiskal yang terjepit dengan defisit 2,48%, tidak elok jika subsidi energi sangat besar anggarannya dalam postur APBN-P 2016" ungkap Said Abdullah.(DFS)

# SEMANGAT HUT KE-71 KEMERDEKAAN RI



Kementerian ESDM merayakan HUT ke-71 RI yang bertema "Dengan Semangat Kemerdekaan Kita Wujudkan Kerja Nyata Untuk Mandiri Energi Melalui Konservasi". Dalam acara ini digelar beberapa perlombaan dan hiburan oleh pegawai Kementerian ESDM. Menteri ESDM Arcandra Tahar memberikan sambutan mengawali acara perayaan ini.

Acara pertama diawali dengan penampilan tari poco-poco dari Dharma Wanita dan *vocal group* dari Kementerian ESDM. Selanjutnya digelar acara senam bersama; semua peserta termasuk Menteri dan para pejabat Kementerian ESDM terlihat begitu antusias mengikuti arahan gerakan senam dari para instruktur. Berbagai macam lomba seperti lomba mewarnai untuk anak-anak, lomba makan kerupuk, dan lomba rebut kursi berjalan dengan meriah diiringi semangat dari setiap peserta yang mengikuti. (UH)



# Galeri



# MKI Luncurkan Rangkaian Acara HLN Ke-71



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (tengah) hadir dalam peluncuran logo terbaru Hari Listrik Nasional (HLN) ke-71 di Jakarta (23/6).

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada Kamis (23/6) menggelar peluncuran Hari Listrik Nasional (HLN) ke-71 di Hotel Four Seasons, Jakarta. Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, Ketua MKI Supangkat Iwan Santoso, para Eselon II di Ditjen Ketenagalistrikan, jajaran PT PLN (Persero) dan para anggota MKI. Acara tersebut diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan Buka Bersama anggota MKI yang rutin diselenggarakan setiap tahun.

Ketua HLN ke-71, Noesita Indriani dalam paparannya menjelaskan logo terbaru HLN ke-71 yang terdiri dari warna biru dan kuning membentuk angka 71.

"Biru mencerminkan kematangan, kepercayaan, sedangkan kuning menggambarkan energi, kebersamaan dan kehangatan," ujar Noesita.

Ia juga memaparkan rangkaian kegiatan HLN ke-71 yang akan dimulai tanggal 28 September nanti. "Rangkaian kegiatan dimulai dengan seminar dan pameran yang akan dilaksanakan di JCC," jelas Noesita. Selanjutnya rangkaian kegiatan HLN ke-71 akan dimeriahkan dengan kegiatan sepeda santai, *coffee morning*, dan upacara pada puncak HLN tanggal 27 Oktober mendatang.

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dalam sambutannya mengapresiasi langkah MKI yang telah menyelenggarakan

## Warta Kita



*Ketua HLN ke-71, Noesita Indriani dalam paparannya menjelaskan logo terbaru HLN ke-71 yang terdiri dari warna biru dan kuning membentuk angka 71.*

*Selain peluncuran logo terbaru HLN ke-71, diselenggarakan pula buka puasa bersama anggota MKI.*



rangkaian HLN dalam tiga tahun terakhir. "Kalau kita lihat pelaksanaannya dari tahun ke tahun makin membaik sesuai dengan harapan kita semua," jelas Jarman. MKI menurutnya juga telah memberikan masukan-masukan penting kepada pemerintah terkait berbagai kebijakan yang ada.

Jarman berharap MKI bersama-sama pemerintah mampu bekerja meningkatkan rasio elektrifikasi dimana saat ini masih sekitar 88%. "Masih ada 12% yang belum terlistriki. Di luar Jawa *reserve margin* juga masih kecil," ungkap Jarman. MKI diminta lebih berperan aktif menyelesaikan tantangan-tantangan khususnya meningkatkan kwh/kapita.

Peningkatan konsumsi listrik perkapita menurut Jarman merupakan salah satu keberhasilan pembangunan. Ia berharap kenaikan kwh/kapita yang diikuti pembangunan pembangkit dan transmisi dapat berjalan tepat waktu.

"Hal tersebut bukan semata-mata pekerjaan pemerintah

maupun PLN tapi semua elemen masyarakat ketenagalistrikan," ujar Jarman. Ia berharap untuk menyelesaikan target-target pembangunan, komponen-komponen ketenagalistrikan harus diperkuat. Tidak hanya peran swasta dalam program 35.000 MW yang akan diperkuat, namun juga peran MKI. Jarman berharap peran MKI tidak hanya dalam menyelenggarakan hari listrik nasional tapi juga dalam bentuk seminar-seminar yang lebih membumi yang hasilnya bisa diangkat dalam bentuk regulasi.

Jarman mengucapkan selamat atas peluncuran logo HLN yang baru. Ia juga berharap seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik. Acara dilanjutkan dengan pemaparan perencanaan ketenagalistrikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul dan dilanjutkan dengan konferensi pers.(PSJ)

# Resensi Buku



Judul: Penjelasan PUIL 2011 (Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011)  
Data Fisik: ix+249 halaman  
Data Terbit: 2014; Jakarta, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Edisi: 2014

Salah satu faktor penting bagi terpenuhinya keselamatan ketenagalistrikan adalah pemasangan instalasi listrik yang memenuhi ketentuan dan atau standar yang diatur dalam Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) sebagai acuan untuk pemasangan instalasi listrik.

PUIL sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1964 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu PUIL 1977, PUIL 1987, PUIL 2000 dan terakhir PUIL 2011. Sejak tahun 2000, PUIL sebagai Peraturan Umum Instalasi Listrik berubah menjadi Persyaratan Umum Instalasi Listrik dan diberlakukan secara wajib. Terbitnya PUIL 2011 (SNI 0225:2011), akan menjadi acuan baru pemasangan instalasi listrik, yang merevisi PUIL sebelumnya dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan standar internasional.

Mengingat PUIL berisikan persyaratan, spesifikasi teknik dan besaran listrik yang digunakan sebagai pegangan pemasangan instalasi listrik, maka untuk memudahkan masyarakat serta agar terhindar dari keraguan dalam hal pemilihan spesifikasi, jenis dan cara pemasangan peralatan listrik, disusunlah buku penjelasan PUIL 2011 yang berisi tentang keterangan tambahan, perhitungan dan jenis gambar peralatan listrik yang diperlukan, dengan nama Penjelasan PUIL 2011.

Buku ini merupakan buku pelengkap/tambahan yang menjelaskan hal-hal yang diatur dalam PUIL 2011, maka buku ini tidak dapat digunakan secara mandiri tanpa disertai dengan buku PUIL 2011, atau dengan kata lain buku ini harus

digunakan bersama-sama dengan buku PUIL 2011. Buku ini merupakan rintisan, karena itu hanya sebagian ayat/subayat dalam PUIL 2011 yang dijelaskan. Diharapkan untuk masa mendatang akan lebih banyak lagi ayat/subayat dalam PUIL 2011 yang perlu dijelaskan.

**Resensi oleh:  
Ernawaty, S.Sos.  
(Pustakawan Madya)**

*Ditjen Ketenagalistrikan*

# Selenggarakan Upacara HUT ke-71 Indonesia



Ditjen Ketenagalistrikan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyelenggarakan upacara bendera di halaman Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Rabu (17/8). Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul bertindak selaku Pembina Upacara.

Upacara yang diikuti oleh para pejabat, pegawai, serta ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan di Ditjen Ketenagalistrikan ini berlangsung tertib dan khidmat. Alihuddin mengajak peserta upacara untuk mengheningkan cipta demi mengenang jasa pahlawan yang membawa Indonesia pada kemerdekaan.(AMH)



# Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Paparkan Kronologis Pengesahan Draft RUPTL

Menteri ESDM pada tanggal 10 Juni 2016 telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2016–2025 melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 5899 K/20/MEM/2016. Menurut Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul, proses perubahan RUPTL tersebut berjalan sekitar enam bulan karena evaluasi teknis yang dibahas bersama antara Ditjen Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero).

“Dalam proses evaluasi tersebut murni karena evaluasi teknis, bukan politis seperti polemik yang ada di media massa,” jelas Alihuddin. Hal tersebut disampaikannya saat Buka Puasa Bersama MKI dan *launching* Hari Listrik nasional ke-71, di Hotel Four Seasons Jakarta, Kamis (23/6).

Menurut Alihuddin, setelah evaluasi teknis antara Ditjen Ketenagalistrikan dan PLN selesai pada tanggal 30 Mei 2016, Dirut PLN menyampaikan permohonan pengesahan

RUPTL. Tanggal 10 Juni Menteri menandatangani keputusan tersebut. “Karena Menteri ada tugas ke luar negeri dan pendampingan Presiden,” Alihuddin menjelaskan.

Menurutnya, berdasarkan rapat pembahasan yang telah dilakukan sebanyak lima kali, terdapat 57 poin yang harus ditindaklanjuti dalam perbaikan Draft RUPTL. Beberapa hal yang disepakati antara pemerintah dan PLN antara lain porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2025 kurang dari 25%, porsi PLN dalam Program 35.000 MW, serta konsistensi perencanaan.

Membangun infrastruktur ketenagalistrikan menurut Alihuddin bagaikan membangun rumah. Jika perencanaannya tidak sinkron, maka rumah tersebut akan miring dan tidak elok dipandang. RUPTL sendiri dijelaskan Alihuddin tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun



Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul memaparkan kronologis pengesahan draft RUPTL saat peluncuran logo HLN ke-71 (23/6).

## Warta Kita



*Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul menjelaskan beberapa kesepakatan penting dalam pembahasan RUPTL 2016–2025.*

*Sesditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono (paling kiri) dan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad (depan, kedua dari kiri) turut menghadiri acara peluncuran logo HLN ke-71.*



2009 tentang Ketenagalistrikan dan peraturan turunannya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUK) dan RUPTL.

“Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diperlukan perubahan, dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan,” jelas Alihuddin.

Dalam kesempatan tersebut, Alihuddin menjelaskan beberapa kesepakatan penting dalam pembahasan RUPTL 2016–2025. Beberapa kesepakatan penting tersebut antara lain adalah perlu adanya konsistensi perencanaan dalam rancangan RUPTL 2016–2025 dengan RUPTL 2015–2024. “Setiap perubahan proyek dari RUPTL 2015–2024 harus dituangkan dalam subbab khusus perubahan,” lanjut Alihuddin.

Proyek-proyek yang didanai melalui APBN yang belum selesai dalam tahun pelaksanaannya sesuai kesepakatan tersebut harus dilanjutkan dan dituangkan dalam RUPTL 2016–2025 dengan nama proyek yang sama. Poin selanjutnya adalah proyek-proyek yang *on-going* dan proyek –proyek yang pendanaannya sudah *committed* agar tetap dijalankan.

Poin terakhir, apabila diperlukan perubahan terhadap suatu proyek, harus dibuat studi oleh konsultan independen dan proses perubahannya harus melalui mekanisme sebagaimana proyek tersebut dimasukkan dalam perencanaan (mendapat persetujuan dari institusi terkait).(PSJ)

# TIPS SENAM RINGAN *di Meja Kerja*

*Sebagai pegawai kantoran, duduk terus-menerus di depan komputer dalam waktu yang lama bisa membuat Anda mengalami beberapa keluhan. Keluhan yang paling banyak ialah pegal-pegal di bagian leher, punggung, serta kaku pada bagian otot. Hal ini diakibatkan oleh kebiasaan duduk terlalu lama yang menyebabkan pembuluh-pembuluh darah tersumbat.*



Beberapa pakar kesehatan menganjurkan kepada pekerja kantor untuk melakukan peregangan ringan pada sela-sela kegiatan kantor untuk mempertahankan kelancaran aliran darah. Gerakan yang dilakukan adalah gerakan ringan yang walaupun sederhana namun efeknya cukup besar.

Nah, berikut ini ada beberapa gerakan ringan yang bisa dilakukan untuk meregangkan otot selama anda bekerja di belakang meja. Gerakan-gerakan ringan ini bisa dilakukan tanpa harus meninggalkan ruang kerja anda.

### **1. Peregangan leher**

Duduklah dalam posisi tegak. Gerakan leher anda dalam posisi tunduk, tengadah ke atas, menengok ke kiri, menengok ke kanan, miring kiri dan kanan secara bergantian dengan masing-masing ditahan dalam 8 hitungan. Hal ini bisa dilakukan kapan saja untuk mengurangi ketegangan dan tekanan pada leher. Usahakan jangan membunyikan leher karena bisa menyebabkan kerusakan sendi leher.

### **2. Peregangan bahu**

Tempelkan kedua tangan anda pada bahu, lalu secara perlahan putar bahu ke arah depan dan belakang secara bergantian. Anda bisa melakukannya sebanyak 10-15 kali sesuai dengan kondisi anda sendiri. Atau anda juga bisa melakukan dengan cara tangan memegang meja selebar bahu, lalu menarik dan mendorong tubuh anda ke arah meja.

### **3. Peregangan tangan**

Putar pergelangan tangan anda searah dan berlawanan jarum jam secara bergantian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pegal pada tangan anda ketika anda terlalu banyak mengetik.

### **4. Peregangan kaki**

Sama halnya seperti peregangan tangan, putarlah pergelangan kaki anda searah dan berlawanan jarum jam selama waktu yang anda anggap cukup. Gerakan ini bisa mencegah kesemutan pada kaki akibat terlalu lama dalam posisi duduk.

# Tips



## 5. Peregangan punggung

Pegal pada punggung adalah keluhan yang paling banyak dialami oleh pekerja kantoran yang bekerja lama di depan komputer. Hal ini rata-rata disebabkan oleh salahnya posisi duduk saat sedang melakukan pekerjaan di meja kantor. Duduklah dengan lurus dan tegak untuk menghindari resiko sakit pada punggung. Lakukan peregangan dengan menarik badan ke depan dan belakang hingga anda merasakan tarikan lembut pada punggung anda.

## 6. Peregangan dada

Duduk yang bungkuk pada saat di meja kerja juga terkadang menimbulkan rasa sedikit sesak pada dada anda. Untuk menguranginya, coba lakukan gerakan dengan membuka lebar-lebar kedua tangan anda, lalu putar ke depan dan belakang sehingga anda merasakan ada peregangan pada bagian dada anda.

## 7. Peregangan perut

Tarik otot perut pada saat bernapas lalu tahan selama beberapa detik dan lepaskan. Lakukan gerakan ini beberapa menit dengan mengulang-ulang menahan otot perut pada saat anda bernapas.

Lakukanlah latihan peregangan sederhana ini setiap hari secara rutin sehingga anda akan mendapatkan manfaat

berupa kebugaran tubuh dan juga meningkatkan kekuatan bagian-bagian tubuh yang biasa digunakan untuk menunjang aktifitas anda sehari-hari di kantor. Atur juga meja kerja anda sedemikian rupa sehingga posisi monitor sejajar dengan mata dan tangan tidak menggantung saat mengetik. Jika memungkinkan berdiri dan berjalanlah keluar ruangan selama beberapa menit untuk menghirup udara segar. Selamat berlatih! (UH)

*Sumber foto: Google*



Para narasumber dalam Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan yang diselenggarakan di Novotel Pangkal Pinang, Bangka, Kamis (21/7).

# *Konsumen dan Penyedia Listrik* **Harus Tahu Hak dan Kewajibannya**

Konsumen maupun penyedia tenaga listrik harus sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga kegiatan sosialisasi diperlukan agar masyarakat memahaminya. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra, saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan yang diselenggarakan di Novotel Pangkal Pinang, Bangka, Kamis (21/7).

Menurut Satya, berdasarkan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, pelaku usaha ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik sesuai dengan standar mutu dan keandalan yang berlaku dan konsumen berhak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Menurut Satya, sejak diberlakukan tahun 2002, telah dilaksanakan perbaikan terhadap regulasi Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero). Sejak tahun 2014, sanksi pinalti 20% dari biaya beban atau rekening minimum diberlakukan



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra menyampaikan sejak diberlakukan tahun 2002, telah dilaksanakan perbaikan terhadap regulasi Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero).

untuk lima indikator yaitu lama gangguan, jumlah gangguan, kesalahan pembacaan kWh meter, kecepatan pelayanan perubahan daya, dan waktu koreksi rekening.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, jumlah konsumen yang mendapatkan kompensasi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp90 milyar untuk 18.7 juta konsumen, sedangkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp79 milyar untuk 7,5 juta konsumen.

"Pemerintah berharap dengan semakin meningkatnya pelayanan PLN, maka jumlah pemberian kompensasi akan terus menurun, sehingga hal tersebut juga akan menguntungkan keuangan PLN," ungkap Satya.

Peningkatan pelayanan oleh PLN disebut Satya tidak hanya menguntungkan konsumen akan tetapi juga menguntungkan PLN secara korporasi. Dengan menyalurkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik berarti PLN mendapatkan penjualan listrik secara terus menerus dan tidak kehilangan penjualan akibat dari pemadaman listrik yang dirasakan oleh konsumen. Peningkatan pelayanan juga terkait dengan peringkat indikator *getting electricity* yang merupakan salah satu

indikator pada *ease of doing business* Indonesia yang diharapkan semakin meningkat setiap tahun.

Satya menambahkan, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada konsumen dan meningkatkan kemudahan mendapatkan listrik, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2016 mulai 1 Januari 2017 jumlah indikator pinalti menjadi 6 indikator dengan tambahan indikator pinalti kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.

"Adapun besaran pengurangan tagihan listrik TMP menjadi 35% dari biaya beban/rekening minimum untuk pelanggan yang dikenakan *Tariff Adjustment* dan 20% dari biaya beban/rekening minimum untuk pelanggan tarif subsidi," tambah Satya.

Acara yang digelar selama satu hari ini menghadirkan pembicara dari Ditjen Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) dan Ketua YLKI Tulus Abadi. Peserta acara ini berasal dari unsur Pemda, Tokoh Masyarakat, Pelanggan Listrik golongan Rumah tangga, Bisnis, Industri Akademisi, Asosiasi-Asosiasi listrik serta Pers. Acara semakin meriah dengan membagikan *doorprize* menarik sehingga semua peserta menunggu hingga acara berakhir.(PSJ)



Narasumber dari PLN menyampaikan paparannya.

# Kembali Gelar *Coffee Morning*, Ditjen Gatrik Sosialisasikan RUPTL Terbaru



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membuka *coffee morning* di Ditjen Ketenagalistrikan, Jumat (22/7).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada hari Jumat (22/7) menyelenggarakan Sosialisasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2016 s.d. 2025.

Acara yang dikemas dalam bentuk *coffee morning* ini menghadirkan beberapa pembicara seperti Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul, Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Nicke Widayawati dan Komite Nasional Indonesia untuk *World Energy*

*Council* Dr. Hardiv H Situmeang, serta mengundang sekitar 300 pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membuka *coffee morning* dengan membagi pesan-pesan kepada peserta khususnya PT PLN (Persero) selaku pelaksana dari RUPTL. Pesan yang disampaikan kepada PT PLN khususnya terkait catatan penting hasil Rapat Terbatas tanggal 22 Juni 2016 mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

## Warta Kita

Beberapa catatan penting dalam rapat terbatas tersebut antara lain agar PT PLN memprioritaskan Badan Usaha Nasional yang mampu melalui skema IPP, dengan persyaratan yang tidak menyulitkan. Selanjutnya catatan kedua adalah agar PT PLN mengutamakan pembelian tenaga listrik dengan memberikan porsi yang besar pada IPP.

Hasil rapat terbatas tersebut juga mengamanatkan PT PLN agar mengkaji target porsi PLN 10.000 MW agar lebih realistis, berdasarkan pengalaman selama ini. "PLN belilah setrum bukan beli mesin," Menteri ESDM menyampaikan.

Artinya adalah porsi pembangkit secukupnya saja, sisanya diberikan ke swasta, sehingga bebannya terbagi, kecepatan bertambah sehingga proses pembangunan dapat terbagi dengan berbagai macam pihak.

Selanjutnya PLN diharap fokus pada prioritas pembangunan transmisi. Penguatan pengembangan EBT termasuk mikro dan mini hidro juga menjadi fokus dalam rapat tersebut. Yang utama adalah agar PLN melaksanakan kebijakan pemerintah dengan konsisten, termasuk pemanfaatan EBT dan PLTU Mulut Tambang.

"Selanjutnya PLN harus mempunyai perspektif bahwa penyediaan listrik adalah tugas negara, dan bukan semata tugas korporasi yang mengedepankan aspek komersial," Sudirman menegaskan.

Alihuddin Sitompul yang ditunjuk sebagai narasumber pertama menyampaikan mengenai Rencana Umum Ketenagalistrikan sebagai dasar penyusunan RUPTL. Menurutnya RUPTL merupakan dasar pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. RUPTL disusun oleh badan usaha yang memiliki wilayah usaha dan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUK).

"RUK ini disahkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya," jelas Alihuddin. Nicke dalam presentasi kedua memaparkan beberapa dasar mengapa RUPTL sebelumnya diubah. Beberapa poin lain yang disampaikan Nicke antara lain adalah Asumsi & Hasil Prakiraan Kebutuhan Listrik 2016-2025, rencana pengembangan pembangkit, transmisi, *fuel mix*, serta rencana kebutuhan investasi. Hardiv Situmeang memaparkan tentang Membedah Perencanaan Ketenagalistrikan Nasional.

Sosialisasi RUPTL melalui *coffee morning* ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi badan usaha mengenai peluang-peluang investasi di sektor ketenagalistrikan, sehingga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan utama memenuhi kebutuhan listrik bagi rakyat Indonesia dapat tercapai. Selesai acara para Kepala Dinas ESDM menghadiri rapat koordinasi bersama Dirjen Ketenagalistrikan. (PSJ)



Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul menyampaikan mengenai Rencana Umum Ketenagalistrikan sebagai dasar penyusunan RUPTL.

# RUPTL Harus Menjawab Kebutuhan dan Rencana Pembangunan

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) harus menjawab kebutuhan-kebutuhan dan rencana pembangunan pemerintah. Untuk itu PT PLN (Persero) melakukan review terhadap RUPTL 2015-2024 dan akhirnya ditetapkan RUPTL 2016-2025 melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 5899 K/20/MEM/2016. Hal tersebut disampaikan Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Nicke Widyawati saat menyampaikan presentasi dalam *coffee morning* Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jumat (22/7).

Review terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2015-2024 dilakukan karena beberapa hal, salah satunya adalah tidak terpenuhinya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diproyeksikan 4,7%, lebih rendah daripada asumsi pada RUPTL sebelumnya sebesar 6,1%," papar Nicke. Selanjutnya terjadi penurunan pertumbuhan penjualan pada 2015 yang signifikan, terutama di Jawa-Bali yang berkontribusi 80% pasar namun hanya tumbuh 1,2% terutama penurunan pada sektor industri dan bisnis.

"Sehingga total Indonesia hanya sekitar 2%," tambah Nicke.



Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Nicke Widyawati saat menyampaikan presentasi dalam *coffee morning* Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jumat (22/7).

Perubahan lain dalam RUPTL terbaru ini menurut Nicke adalah pertumbuhan penjualan tahun 2016-2025 diperkirakan rata-rata 8,6% per tahun dibandingkan RUPTL sebelumnya sebesar 8,7% per tahun.

"Beberapa proyek FTP-1 di luar Jawa diperkirakan mundur dari jadwal semula sehingga perlu pemutakhiran jadwal operasi proyek," jelas Nicke.

Selain itu, adanya kebijakan pemerintah untuk menambah porsi pembangkit berbahan bakar gas dan

EBT hingga 25% pada 2025, sehingga terdapat beberapa potensi proyek baru EBT yang perlu direncanakan untuk dibangun.

RUPTL terbaru ini disebut Nicke telah mempertimbangkan kebutuhan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri baru. Selanjutnya hampir semua proyek PLTU skala kecil tidak berjalan lancar sehingga perlu ada pengganti/antisipasi.

Total pembangkit yang akan dibangun hingga tahun 2025 ditargetkan

## Warta Kita

*Coffee morning menjadi ajang diskusi serta sharing informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan ketenagalistrikan.*



*Peserta coffee morning berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, PLN, asosiasi ketenagalistrikan serta stakeholder lainnya.*



mencapai 80,5 MW. PLTU mendominasi dengan kapasitas 34,8 GW. Untuk pembangkit dari EBT disebutkan Nicke, PT PLN akan membangun 22.186 MW hingga tahun 2025 dengan dominasi PLTA sebesar 13.100 MW disusul PLTP sebesar 6.150 MW. Total jaringan transmisi yang akan dibangun hingga tahun 2025 mencapai 67.9 ribu kms sedangkan gardu induk yang akan dibangun 172.1 ribu MVA.

Menurut Nicke, untuk memenuhi target EBT 25% pada tahun 2025 hanya dapat dicapai apabila ada tambahan PLTN

sebesar 3,6 GW atau EBT lain sebesar 14,4 GW.

"Dalam RUPTL ini dipilih opsi pengembangan pembangkit gas sebagai kontingensi apabila target EBT tersebut tidak tercapai," paparnya. Total kebutuhan investasi dalam RUPTL terbaru ini ditargetkan mencapai 153,8 miliar dollar.

PT PLN berharap adanya dukungan pemerintah terhadap Juklak/Juknis di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Implementasi Perpres

Nomor4Tahun2016. PLNmengharapkan dukungan pada kebijakan yang dapat mendorong *Integrasi Supply&Demand side*, kebijakan untuk memitigasi resiko eksplorasi panas bumi bagi pembembang, Pembentukan Badan Penyangga EBT, serta Kebijakan Energi Primer.(PSJ)

# Ditjen Gatrik Sosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan di Mataram



*Para narasumber dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (21/7).*

Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (21/7). Peserta sosialisasi berasal dari dinas pertambangan dan energi tingkat provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi, konsumen, dan pelaku usaha sektor ketenagalistrikan di Provinsi NTB. Para narasumber berasal dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi NTB, dan PT PLN (Persero) wilayah NTB.

Sosialisasi dibuka oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi NTB, M. Husni. Ia menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi di Provinsi NTB belum mencapai 80%. "Ada 20% lebih rumah tangga di NTB yang belum menikmati listrik," ungkap Husni. Ia mengingatkan jika melistriki masyarakat secara legal adalah tugas semua pihak termasuk pemerintah; baik pusat maupun daerah.

Husni berharap sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang sama antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. "Kita ini bekerja dasarnya regulasi. Jika tidak sepaham, akan mengganggu pembangunan khususnya

## Warta Kita



Sosialisasi dibuka oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi NTB, M. Husni. Ia mengungkapkan bahwa rasio elektrifikasi di Provinsi NTB belum mencapai 80%.



Salah seorang peserta sosialisasi menyampaikan pertanyaan dalam sesi diskusi.

bidang ketenagalistrikan," ujarnya. Husni pun kemudian menyoroiti perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan bidang ESDM sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menjelaskan jika Pemerintah Provinsi NTB memakai peraturan gubernur untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut.

Pembahasan mengenai penataan kewenangan bidang ESDM sesuai Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibahas lebih lanjut oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Anshori. Ia menyampaikan bahwa kewenangan urusan minerba, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan (EBT), dan geologi dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

"Pemerintah kabupaten/kota kini hanya mempunyai kewenangan pada subbidang EBT yakni terkait dengan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota," papar Anshori.

Paparan mengenai kebijakan ketenagalistrikan di Provinsi NTB disampaikan oleh Kepala Bidang Energi Dinas Pertambangan dan Energi NTB, I Gede Tatar Sutaryana. Ia menyampaikan Pemerintah Provinsi NTB telah siap dengan regulasi untuk penerbitan perizinan di bidang ketenagalistrikan. Selain itu, ia juga mengungkapkan permasalahan terkait perizinan bidang ketenagalistrikan di NTB, antara lain masih terdapat kepemilikan genset (*captive power*) yang belum mengajukan Izin Operasi (IO) disebabkan karena terbatasnya sosialisasi

pasca beralihnya kewenangan penerbitan izin dari kabupaten/kota ke provinsi. Dengan adanya sosialisasi ini, pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan dapat lebih memahami tentang peralihan kewenangan tersebut sesuai Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Manajer Niaga PT PLN (persero) wilayah NTB, Aris Suwardiyanto, memaparkan tentang kondisi kelistrikan di NTB. Senada dengan yang disampaikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi NTB dalam sambutannya, Aris menjelaskan jika rasio elektrifikasi di NTB hingga Juni 2016 mencapai 74,84%. Pada 2020, rasio elektrifikasi diproyeksikan mencapai 99,90%.

Narasumber dari Ditjen Ketenagalistrikan berasal dari direktorat pembinaan program ketenagalistrikan, direktorat pembinaan perusahaan ketenagalistrikan, serta direktorat teknik dan lingkungan ketenagalistrikan. Regulasi terkait program ketenagalistrikan dijelaskan oleh Trinaldy Konnelly, regulasi terkait pembinaan perusahaan ketenagalistrikan oleh Tri Handoko, dan regulasi terkait teknik dan lingkungan ketenagalistrikan oleh Winsisma Wansyah.

Sesi tanya jawab dimanfaatkan peserta sosialisasi untuk menyampaikan permasalahan serta sharing tentang kondisi yang dihadapi di lapangan. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antar semua pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan wilayah NTB sehingga pembangunan ketenagalistrikan dapat berjalan dengan lancar.(AMH)

# Koordinasi Pusat dan Daerah di Bidang Ketenagalistrikan Terus Ditingkatkan



*Sesditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono dalam rapat koordinasi dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi se-Indonesia di Jakarta (22/7).*

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah daerah di subsektor ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenagalistrikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk itu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Jumat (22/7) menggelar rapat koordinasi antara Dirjen Ketenagalistrikan dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi se-Indonesia di Jakarta.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto yang menyampaikan

presentasi mengenai tindak lanjut UU No 23/2014 khususnya terkait bidang ketenagalistrikan.

Direktur Ketenagalistrikan, Jarman mengungkapkan bahwa dengan terbitnya UU tentang Pemerintah Daerah yang baru ini banyak kewenangan yang tadinya dilakukan oleh Bupati/Walikota, kemudian sekarang diambil alih oleh Gubernur. "Banyak juga pertanyaan dari para kepala Dinas terkait Permendagri tentang hibah listrik untuk masyarakat," jelas Jarman. Dengan hadirnya Kepala Biro Hukum dari kemendagri, menurut Jarman kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para Kepala Dinas ESDM.

Dalam acara ini dipaparkan juga mengenai Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul. Selanjutnya paparan tentang Wilayah Usaha, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra. Sebagai penutup Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad menyampaikan presentasi mengenai Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Alihuddin Sitompul menjelaskan bahwa sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, setiap Pemerintah Provinsi wajib memiliki Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).

"RUKD adalah Rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah provinsi yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Provinsi," papar Alihuddin.

Proyeksi dalam RUKD Provinsi mencakup kurun waktu dua

## Warta Kita



**Kiri atas** - Para peserta rapat koordinasi merupakan Kepala Dinas ESDM Provinsi se-Indonesia atau yang mewakilinya.

**Kiri bawah** - Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto menyampaikan presentasi mengenai tindak lanjut UU No 23/2014 khususnya terkait bidang ketenagalistrikan.

**Kanan atas** - Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad menyampaikan presentasi mengenai Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

puluh tahun ke depan. Sedangkan data yang digunakan untuk perencanaan merupakan data historis paling sedikit sepuluh tahun terakhir.

Berdasarkan paparan Satya Zulfanitra, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam usaha penyediaan tenaga listrik antara lain:

- Rekomendasi penetapan wilayah usaha dilengkapi dengan batasan wilayah usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat.
- Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi.
- Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.
- Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.
- Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan

tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Munir Ahmad dalam paparannya menyampaikan beberapa saran terkait sertifikasi ketenagalistrikan dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. Beberapa saran yang disampaikan antara lain bahwa Pemda segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) Ketenagalistrikan yang mengatur pelaksanaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Selanjutnya Pemda diminta menyiapkan sarana dan prasarana serta personel yang menangani penerbitan IUJPTL dan SLO. Hal selanjutnya dapat dilakukan Pemda adalah membuat sistem Database Online untuk memantau pelaksanaan sertifikasi dan penerbitan IUJPTL dan SLO. Terakhir yang perlu dilakukan Pemda adalah melaporkan hasil pelaksanaan penerbitan IUJPTL dan SLO kepada Direktur Jenderal minimal satu kali dalam enam bulan. (PSJ)

# SINERGI UNTUK KEANDALAN KELISTRIKAN *di Kalimantan Timur*

Ditjen Ketenagalistrikan menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk konsultasi mengenai permasalahan kelistrikan di Kalimantan Timur (19/8). Rombongan terdiri dari anggota, tenaga ahli, serta staf Komisi III DPRD Kalimantan Timur dan dipimpin oleh HM Syahrudin selaku Ketua DPRD.

Rombongan disambut oleh Kepala Bagian Hukum Ditjen Ketenagalistrikan Winsisma Wansyah, yang mewakili Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan. Nampak hadir perwakilan dari Bagian Hukum Ditjen Ketenagalistrikan, Direktorat Program Ketenagalistrikan, serta Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur. Rapat konsultasi dilaksanakan di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta.

Ketua Komisi III, Dahri Yasin, menjelaskan tentang peraturan daerah tentang kelistrikan yang sudah disahkan di

Kalimantan Timur. "Kini kami sedang menggodok peraturan daerah mengenai perusahaan daerah (perusda) kelistrikan," jelasnya.

Ia menyatakan pembentukan perusda ini diharapkan dapat menjadi potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sana. Selain itu, Dahri melanjutkan, peraturan tersebut dirancang supaya daerah memiliki wewenang untuk mengatasi masalah kelistrikan yang ada. Beberapa masalah yang dibahas antara lain mengenai wilayah usaha, regulasi mengenai *excess power*, hingga kemungkinan pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik di provinsi paling timur Pulau Kalimantan tersebut.

Sebagai gambaran awal, Hanat Hamidi – Kasubdit Listrik Perdesaan Ditjen Ketenagalistrikan – menyampaikan jika rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur sudah mencapai



*Ditjen Ketenagalistrikan menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk konsultasi mengenai permasalahan kelistrikan di Kalimantan Timur (19/8).*

## Warta Kita



Kepala Bagian Hukum Ditjen Ketenagalistrikan Winsisma Wansyah (kiri) menyarankan agar DPRD Kalimantan Timur duduk bersama dengan PLN untuk membahas peraturan di sektor kelistrikan sehingga peraturan yang dihasilkan bisa selaras.

96,24% per Juni 2016. "Ini lebih baik dibanding rasio elektrifikasi nasional yang baru 88,3%," ujarnya.

Hanat memaparkan program pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur pada tahun 2016 ini, di antaranya adalah pembangunan jaringan transmisi tegangan menengah (JTM) sepanjang 327 kms, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 146 kms, serta trafo distribusi sebesar 115 kVa. Agung Sulistyو dari Direktorat Program Ketenagalistrikan menambahkan jika pembangkit listrik di Kalimantan Timur didominasi oleh bahan bakar minyak (BBM). Sampai 2025, lanjut Agung, direncanakan akan dibangun pembangkit dengan total kapasitas 2300 MW di Kalimantan Timur.

"Karena sebagian sistem Kalimantan Timur sudah terkoneksi dengan sistem Kalimantan lain, maka selain tambahan dari pembangkit, nanti juga masuk tambahan dari pembangunan gardu induk. Jadi kita manfaatkan pembangkit-pembangkit di provinsi Kalimantan lainnya untuk masuk ke Kalimantan Timur melalui gardu induk dan saluran transmisi," tambah Agung.

Terkait wilayah usaha, Agung menjelaskan bahwa selain PT PLN (persero) dan *Independent Power Producer (IPP)*, di Kalimantan Timur juga sudah ada beberapa *private power utility (PPU)* yang memiliki wilayah usaha dengan pelanggan tersendiri. PPU ini akan didorong untuk bekerjasama dengan PLN untuk berpartisipasi dalam melistriki Kalimantan Timur. Ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik di provinsi tersebut.

Sehubungan dengan *excess power*, Winsisma menyampaikan jika pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai penetapan harga patokan seperti yang diatur dalam Permen

ESDM Nomor 03 Tahun 2015. Permen tersebut mengatur prosedur pembelian dan harga patokan tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA melalui skema pemilihan langsung dan penunjukan langsung.

Permen ini dimaksudkan untuk mempercepat waktu negosiasi antara PLN dengan IPP karena mengatur mengenai harga patokan tertinggi, serta memberikan kepastian bagi PLN dalam pelaksanaan pembelian tenaga listrik.

Lebih lanjut, Winsisma menyarankan agar DPRD Kalimantan Timur duduk bersama dengan PLN untuk membahas peraturan di sektor kelistrikan sehingga peraturan yang dihasilkan bisa selaras.

Untuk menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan pemanfaatan energi nuklir di Kalimantan Timur, berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), nuklir sebagai energi pembangkit listrik masih menjadi opsi terakhir. Pemerintah akan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan jenis lainnya secara maksimal terlebih dulu, seperti air, surya, angin, dan panas bumi.

HM Syahrुn selaku ketua rombongan menyampaikan apresiasinya atas sambutan Ditjen Ketenagalistrikan pada kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalimantan Timur. Diharapkan konsultasi ini dapat mengurai permasalahan yang dihadapi daerah sehingga laju pembangunan terutama di sektor ketenagalistrikan dapat berjalan dengan baik. (AMH)

# Ditjen Ketenagalistrikan Gelar Buka Puasa Bersama



Pemberian bingkisan Lebaran bagi para pramusaji dan karyawan *cleaning service* Ditjen Ketenagalistrikan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (ketiga dari kiri).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menggelar acara buka puasa bersama di Masjid Al Misbah Ditjen Ketenagalistrikan pada Jumat (24/6) petang. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, para pejabat Eselon I dan II, ibu-ibu pengurus Dharma Wanita, beserta pegawai di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan.

Acara rutin tahunan tersebut bertujuan meningkatkan tali silaturahmi serta mempererat kebersamaan di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan. Acara buka puasa bersama kali ini mengambil tema, "Melalui Puasa Ramadhan Kita Tingkatkan Silaturahmi Subsektor Ketenagalistrikan". Acara dimulai pukul 16.00 WIB dengan pembacaan ayat suci Alqur'an dan saritilawah, kemudian

dilanjutkan dengan sambutan dari Dirjen Ketenagalistrikan Jarman.

Jarman mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menghadiri acara buka puasa ini. Ia mengungkapkan bahwa di bulan Ramadhan ini makna Ramadhan mesti diperdalam dengan melaksanakan ibadah yang wajib maupun sunnah walaupun banyak godaannya. Selain acara berbuka puasa bersama, acara juga diisi dengan ceramah agama dan diakhiri dengan sholat tarawih berjamaah. Dalam acara tersebut juga dibagikan bingkisan Lebaran bagi para pramusaji dan karyawan *cleaning service* Ditjen Ketenagalistrikan.

Ceramah agama diisi oleh Dr. H. Yathonazun, MM dari Universitas

Islam Negeri Gunung Jati Bandung. Dalam ceramahnya, H. Yathonazun menyampaikan bahwa ibadah wajib puasa satu bulan penuh selama Ramadhan memiliki tiga manfaat. Yang pertama adalah untuk menyehatkan badan dan jiwa.

Berpuasa menahan haus, lapar, dan nafsu di bulan Ramadhan bisa menyehatkan badan dan jiwa bagi yang menjalankannya. Yang kedua adalah untuk menambah nilai sosial. Umat muslim yang menunaikan zakat, infaq, dan sodaqoh di bulan Ramadhan mendapat pahala yang berkali-kali lipat.

Dengan bersedekah, maka harta yang dimiliki menjadi suci, berkah dan memberi manfaat bagi orang lain yang menerima sedekah. Yang ketiga adalah untuk nilai spiritual umat. Pada bulan Ramadhan ini banyak yang jadi lebih sering datang ke mesjid untuk beribadah, baik itu shalat wajib maupun shalat sunah. Dengan melakukan ibadah shalat bersama-sama dan bertemu dengan umat muslim lainnya dapat meningkatkan tali silaturahmi antar umat muslim.

Menutup ceramahnya, H. Yathonazun mengungkapkan bahwa selain taqwa kepada Allah, umat muslim juga wajib menjaga silaturahmi sesama umat. Dengan adanya ketakwaan dan lancarnya silaturahmi pada diri umat maka insya allah akan menghasilkan orang yang akhlakul karimah (berakhlak baik). (UH)

# Perkuat Kekeluargaan, Ditjen Ketenagalistrikan Gelar *Halal bi Halal*

Keluarga Besar Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Rabu (20/7) siang menggelar Halal bi Halal yang diselenggarakan di Lobi Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta. *halal bi halal* ini dihadiri oleh para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dimulai dari Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Ronggo Kuncahyo yang memberikan selamat hari raya Idul Fitri kepada Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, para pejabat, mantan pejabat dan pegawai berbondong-bondong mengucapkan selamat dan dengan tulus saling meminta maaf lahir dan batin.

Menurut Jarman, pelaksanaan *halal bi halal* tahun ini memang sedikit terlambat karena untuk mengumpulkan para pejabat dan pegawai memang tidak mudah. Sejak libur Lebaran selesai dan aktif kembali Senin (11/7), para pejabat dan pegawai langsung dipenuhi dengan agenda kerja masing-masing.

Dirjen Ketenagalistrikan sendiri pada hari pertama masuk harus untuk mengikuti rangkaian acara *The 34th Senior Official Meeting on Energy (SOME) and It's Associated Meetings* yang berlangsung Selasa (12/7) hingga Jumat (15/7) di Nay Pyi Taw, Myanmar.

"Alhamdulillah, sekarang semua dapat berkumpul lengkap," ungkap Jarman. Silaturahmi seperti ini menurut Jarman



*Keluarga Besar Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Rabu (20/7) siang menggelar Halal bi Halal yang diselenggarakan di Lobi Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta.*

merupakan acara yang baik, sebab seluruh pejabat dan pegawai dapat bertemu untuk saling mengucapkan permohonan maaf.

"Bagaimanapun juga sebagai umat manusia kita tidak pernah lepas dari kesalahan," ungkap Jarman dalam sambutannya. "Atas nama pimpinan dari Direktorat jenderal Ketenagalistrikan, kami memohon maaf lahir batin atas segala kesalahan-kesalahan selama ini, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang sebsar-besarnya" lanjutnya.

Seusai bersalam-salaman untuk mengucapkan maaf, para pejabat dan pegawai Ditjen ketenagalistrikan saling beramah tamah dan menyantap

sajian khas Lebaran yaitu lontong opor. Seluruh pegawai dan pejabat larut dalam suasana keakraban. (PSJ)

# Quo Vadis PLTN Jepang: Isu Keselamatan PLTN dan Keandalan Listrik Jepang di Masa Depan

Oleh: Ahmad Amiruddin, ST, M.Sc.  
Inspektur Ketenagalistrikan Muda



Pekerja PLTN Fukushima.  
[Sumber foto: AFP/Getty]

Meski bangsa Jepang terkenal gagah berani dan hampir tak kenal takut, tapi mereka punya trauma mendalam terhadap satu hal: nuklir. Di bulan Agustus tahun 1945 dalam waktu hanya berselang 3 hari, dua bom nuklir dijatuhkan oleh tentara Amerika di dua kota: Nagasaki dan Hiroshima. Sebanyak 129.000 orang meninggal, sebagian meninggal saat itu juga, sebagian lagi meninggal karena penyakit dan radiasi. Lebih mengenskannya, para korban adalah warga

sipil. Setelahnya jutaan orang Jepang trauma dengan efek nuklir tersebut.

Setelah Perang Dunia II, Jepang kembali membangun negaranya dari puing. Dimulailah proyek pembangunan PLTN untuk tujuan damai. Sepuluh tahun setelah bom nuklir menghancurkan Jepang, tahun 1955, Jepang menandatangani kesepakatan pengayaan uranium dengan

# Kolom

negara pengebomnya, Amerika Serikat. Dua puluh satu tahun kemudian, atau tepatnya Juli 1966 mulailah pembangunan PLTN pertama di Jepang di Tokai Power Station. Pembangkit pertama dibangun justru oleh kontraktor dari Inggris. Kapasitasnya 166 MWe, relatif kecil untuk ukuran PLTN saat ini [1].

Dari kontraktor yang menangani PLTN tersebut itulah langkah pertama Jepang membangun PLTN berikutnya. Jepang belajar banyak dari proyek tersebut, dan kita tahu sendiri bahwa Jepang adalah pembelajar yang ulet.

Langkah kedua yang dilakukan Jepang setelah membangun PLTN tersebut adalah membentuk *join venture* antara swasta Jepang (Hitachi dan Toshiba) dengan kontraktor Amerika General Electric. Mereka membangun PLTN Light Water Reactor (LWR) pertama berkapasitas 357 MWe. Selanjutnya dalam selang waktu sejak 1970 s.d 1990 Jepang telah membangun 36 PLTN dengan total kapasitas 29 GW dan puncaknya pada tahun 2009 total kapasitas pembangkitan PLTN Jepang sudah mencapai hampir 50 GW, hanya sedikit lebih rendah dari total kapasitas pembangkitan Indonesia saat ini yang sekitar 52 GW[1].

Dalam masa membangun tersebut, rakyat Jepang menerima PLTN dengan terbuka. Tak ada kecelakaan di PLTN yang merenggut jiwa maupun berdampak luas. Memang ada beberapa kasus seperti kebocoran pipa dan adanya tiga buah pembangkit yang pernah *shutdwon* karena gempa, tapi semua aman dan terkendali. Para insinyur dipercaya menjalankan PLTN sesuai dengan kaidah ilmu yang telah dipelajarinya.

Resiko PLTN dapat diminimalisir karena bangunan PLTN di Jepang tahan terhadap gempa berkekuatan tinggi sekalipun. Tapi pada tanggal 11 Maret tahun 2011, sebuah gempa dahsyat terjadi di Jepang. Gempa tersebut berkekuatan 9 Skala Richter[2]. Tak ada kerusakan berarti di semua PLTN di Jepang. PLTN sekitar Fukushima *shutdown* secara otomatis. *Control rod* langsung masuk mendinginkan reaktor.

Menjadi *nature*-nya tenaga nuklir, reaksi yang sudah terjadi tidak bisa langsung dihentikan, dibutuhkan pendinginan yang lama dan terus menerus agar panas yang timbul akibat reaksi fisi yang terjadi tetap terkendali. Saat itu PLTN tidak bisa memproduksi energinya sendiri untuk pendinginan sehingga menggunakan *generator back up* untuk memompa *water cooling*.

Ada hal yang terlupa oleh para *engineer* Jepang yang terkenal teliti dan sangat berdedikasi. Mereka tidak mempersiapkan

bagaimana kalau PLTN terkena tsunami yang lebih tinggi lagi. Memang, *generator backup* masih bisa beroperasi dan memompa *water cooling*, tapi terjangan tsunami setinggi 15 meter menyebabkan generator terendam air sehingga rusak dan terjadilah pemasangan dan berakhir dengan adanya kebocoran reaktor yang berisi zat radioaktif. Standar benteng tsunami PLTN Fukushima saat itu hanya 10 meter[3].

PLTN di Fukushima dibangun tahun 1970an, dan data yang digunakan adalah data tahun 1960-an sehingga prediksi tsunami saat itu tidak terlalu tinggi. Saat tsunami terjadi, 3 orang pekerja PLTN meninggal, tapi tak ada kaitannya dengan radioaktif.

Hari itu juga pemerintah mengumumkan status bencana nuklir, lebih dari 100 ribu penduduk diungsikan dalam radius 20km sekitar PLTN. Hingga saat ini, lokasi sekitar masih tak berpenghuni. Tim penanganan PLTN bekerja sangat keras dan beresiko untuk mengontrol pendinginan PLTN. Tapi tak ada korban jiwa dari pekerja maupun warga sekitar akibat kecelakaan tersebut. Tapi konsekuensinya berdampak besar terhadap nasib 43 unit PLTN di Jepang [1].

Tsunami yang melanda Fukushima juga menjadi "bencana" bagi PLTN yang lain. Semua PLTN dihentikan untuk sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. PLTN yang tidak ada kerusakan dan sejarah kecelakaanpun semua ikut imbasnya. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang sangat ketat dan *assessment* harus dilaksanakan ulang terhadap semua PLTN. *Site-site* baru PLTN tidak mendapat izin dari Pemerintah.

## Kunjungan ke PLTN Hamaoka Jepang

Sebagai peserta training *energy policy* yang diselenggarakan oleh Japan International Cooperation Agency, saya berkesempatan mengunjungi PLTN Hamaoka yang berada di daerah Shizuoka Prefecture, di pantai timur Jepang, sekitar 200 km dari Tokyo. Masuk ke area PLTN sudah terlihat pemeriksaan yang sangat ketat terhadap pengunjung dan kendaraan yang masuk. Kami ditunjukkan simulasi reaktor PLTN di area *exhibition center*. Bentuknya dibuat menyerupai reaktor yang sebenarnya. Saya tidak terlalu berharap bisa melihat ke area PLTN karena setahu saya PLTN adalah salah satu obyek vital negara yang sangat sangat ekstra hati-hati penjagaannya.

Tapi ternyata kami diajak masuk melihat, sebelumnya paspor di-*scan* selama proses perkenalan di *exhibition center*. Saat

## Kolom



masuk ke gerbang, pemandu kami yang juga GM operation PLTN melaporkan keberadaan kami di pos masuk dan kami diperbolehkan masuk ke ring-3 (istilah saya) yang punya akses terhadap *tsunami wall* yang berada di bibir pantai. Saat ini PLTN sedang melakukan perbaikan *tsunami wall* yang sebelumnya 18 meter menjadi 21 meter di atas permukaan laut, sesuai dengan regulasi dari Pemerintah.

Sejak kecelakaan di Fukushima keempat unit PLTN Hamaoka di-*shutdown*. Dua unit dalam tahap *decommissioning*, yang artinya sudah pasti berhenti operasi dan 2 unit lagi sedang dalam perbaikan untuk memenuhi regulasi pemerintah Jepang. Proses *decommissioning* PLTN memakan waktu 20 tahun, dan ini juga yang menjadi salah satu perbedaan mendasarnya dengan pembangkit yang lain, PLTN tidak bisa serta merta ditinggalkan dan dibongkar dengan cepat karena masih adanya zat radioaktif.

Setelah melihat *tsunami wall*, kami berkesempatan melihat hingga di luar bangunan reaktor. Pemeriksaan metal dan *scanning* tubuh dilaksanakan sebelum masuk area ini. Dari area tersebut nampak konstruksi sedang dilakukan untuk mengantisipasi adanya tsunami dan dampak setelah air masuk ke dalam area PLTN. Pintu-pintu masuk dalam *plant* diganti dengan yang tebal sehingga air tak bisa masuk. Ini lah mungkin yang disebut orang dikampung, "tutup pintumu supaya air banjir tidak bisa masuk".

Tidak diperbolehkan mengambil gambar selama tur berlangsung, karena sangat terlarang. Yang pasti, pihak *engineer* PLTN yang saat ini unitnya di-*shutdown* hanya bisa

berucap lirih "Tak ada dasar ilmunya sampai PLTN ini harus di-*shutdown*, semuanya karena pertimbangan non-saintik"

\*\*\*

Sejak seluruh PLTN *shutdown* di Jepang pada tahun 2011, PLTN digantikan oleh PLTU Batubara dan PLTG. Dalam lima tahun itu, Jepang sukses melewati musim dingin dan musim panas tanpa pernah *black out* atau kekurangan daya. Publik di Jepang akhirnya berkesimpulan tak perlu ada PLTN lagi, karena semuanya baik-baik saja. Padahal Jepang sebenarnya di ambang krisis energi kalau tak mengoperasikan PLTN dalam waktu ke depan karena kemampuan internal Jepang untuk

mensuplai dayanya sendiri hanya 6% dari total energi yang dibutuhkannya. Hampir tak ada batubara di Jepang, semuanya diimpor dari Australia dan Indonesia, demikian juga minyak dan gas, semuanya impor. Sebelumnya pada saat PLTN beroperasi Jepang bisa mensuplai sendiri 25% dari energi primernya.

Ditutupnya PLTN juga menyebabkan harga listrik yang dibayar konsumen menjadi lebih mahal dan defisit perdagangan Jepang meningkat. Jajak pendapat publik tak menunjukkan kemajuan berarti, tak ada prefecture yang bersedia wilayahnya dibangun PLTN. *Engineer* berada dalam keadaan terjepit, opini masyarakat pasti diikuti oleh politisi karena pemilik hak suara ditentukan mereka. Padahal dalam sejarah panjang nuklir untuk kepentingan damai di Jepang dalam 50 tahun terakhir, tak ada orang yang meninggal atau terkena kanker karena radiasi dari PLTN, semuanya baik-baik saja. *Engineer* Jepang punya tugas berat meyakinkan rakyat Jepang akan keamanan PLTN dan pentingnya PLTN untuk masa depan bangsa Jepang.

Referensi:

[1]K. Shigimori, "Nuclear Energy Policy in Japan," ed. Tokyo: The Institute of Energy Economics Japan, 2016.

[2]USGS. (2011, 1 Juni). Magnitude 9.0 - NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN. Available: <http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/usc0001xgp/>

[3]WNA. (2016). Fukushima Accident. Available: <http://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/fukushima-accident.aspx>

# Pemberian Hadiah Lomba Foto HUT ke-71 Kemerdekaan Indonesia



Para pemenang juara I, II, dan III berfoto bersama pejabat eselon II Ditjen Ketenagalistrikan usai pemberian hadiah.



Juara favorit dan pemenang hadiah hiburan berfoto bersama pejabat eselon II Ditjen Ketenagalistrikan usai pemberian hadiah.

Ditjen Ketenagalistrikan mengadakan lomba foto merayakan HUT ke-71 Kemerdekaan Indonesia dengan tema "Keceriaan Rayakan HUT Kemerdekaan Indonesia" pada tanggal 1-14 Agustus 2016. Lomba diikuti oleh pegawai/karyawan di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan dengan juri Tim Independen.

Pemenang diumumkan sesuai upacara bendera pada Rabu (17/8). Hadiah pemenang lomba diberikan langsung oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanita, dan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad.(AMH)



Juara I: Petugas cleaning service Ditjen Ketenagalistrikan



Juara II: Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga – Bagian Umum dan Kepegawaian



Juara III: Bagian Keuangan

# Daftar Legislasi dan Regulasi Koleksi Perpustakaan DJK Bulan Januari – September 2016

oleh: Dina Andriani, S.Hum. (Pustakawan Muda)

No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK
1.	Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
2.	Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar
3.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengakuan Sertifikat Produk dan Laporan Hasil Uji peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang Diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang Terdaftar di ASEAN
4.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Asesor Ketenagalistrikan
5.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
6.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
7.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang
8.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
9.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
10.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2016 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan
11.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
12.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
13.	Keputusan Menteri ESDM Nomor 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016 s.d. 2025

Matikan lampu ketika sudah  
tidak digunakan



Save **MORE,**  
Pay **Less**



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan  
Jakarta Selatan 12950  
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044  
[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

**BERANI  
JUJUR DAN  
ANTI KKN,  
HEBAT!**

Direktorat Jenderal  
Ketenagalistrikan

*sebagai*

**Kawasan Anti Korupsi**



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan  
Jakarta Selatan 12950  
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044  
[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)